

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN
PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
(Studi DPD Golkar Kota Bandar Lampung)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**SISCA NOVALIA
NPM : 1521020172**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN
PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK
(Studi DPD Golkar Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**SISCA NOVALIA
NPM : 1521020172**

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Peran perempuan dalam partai politik masih menjadi persoalan, persentase perempuan dalam partai politik semakin banyak minimal 30%. Diantara asumsi masyarakat, yaitu menganggap perempuan menghambat ruang gerak laki-laki, tidak mampu berperan dengan baik dalam melaksanakan tugas partai. Masa Nabi Muhammad Saw, perempuan sudah mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki, tetapi setelah beliau wafat dan penyebaran umat Islam semakin meluas, Islam banyak mengadopsi budaya patriarki, sehingga sering kali ayat-ayat Al-Qur'an di salah tafsirkan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena Islam sangat menjunjung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Masalahnya dapat dirumuskan :1. Bagaimana peran perempuan pada kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan pada kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung?

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perempuan pada kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung dan ntuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan pada kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat *deskriptif analitis*, sumber data penelitian menggunakan data primer, Penelitian ini mengambil 8 sampel dari 80 kepengurusan partai politik DPD golkar kota Bandar Lampung, hal ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya pengolahan data menggunakan *editing*, *coding* serta *reconstruction*. Kemudian dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *berfikir deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa :

1. Peran perempuan partai politik di DPD golkar kota Bandar Lampung, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, karena teruji dengan kecakapan para pengurus perempuan dalam memaparkan pendapat dan melaksanakan program kepengurusan dengan baik. Hal ini Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, keberanian dan pemahaman yang baik terhadap peran-peran yang diemban.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perempuan dalam partai politik di DPD golkar kota Bandar Lampung sesuai dengan Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 97, bahwa apabila seorang perempuan yang memiliki aktifitas dan pekerjaan diluar rumah dapat menyeimbangkan serta tidak meninggalkan kewajiban didalam rumah tangganya, serta telah mendapat ridha dan izin dari suami dan tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat terhadap diri dan agamanya, maka Islam sebagai pedoman tidak melarangnya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung. Telp: 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : Sisca Novalia

NPM : 1521020172

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

**Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan
Pada Kepengurusan Partai Politik (Studi DPD Golkar
Kota Bandar Lampung)**

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag
NIP.195607271988031001

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
NIP.197408162003122004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

Drs. Susiadi AS., M. Sos. I
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung. Telp: 703289

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik (Studi DPD Golkar Kota Bandar Lampung)**”, disusun oleh Nama: **Sisca Novalia**, NPM: **1521020172**, Jurusan **Siyasah Syar'iyah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari/ tanggal: **Jum'at, 10 Mei 2019**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.

Penguji I : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

Penguji II : Drs. H. Mundzir HZ. M.Ag.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan

Fakultas Syari'ah



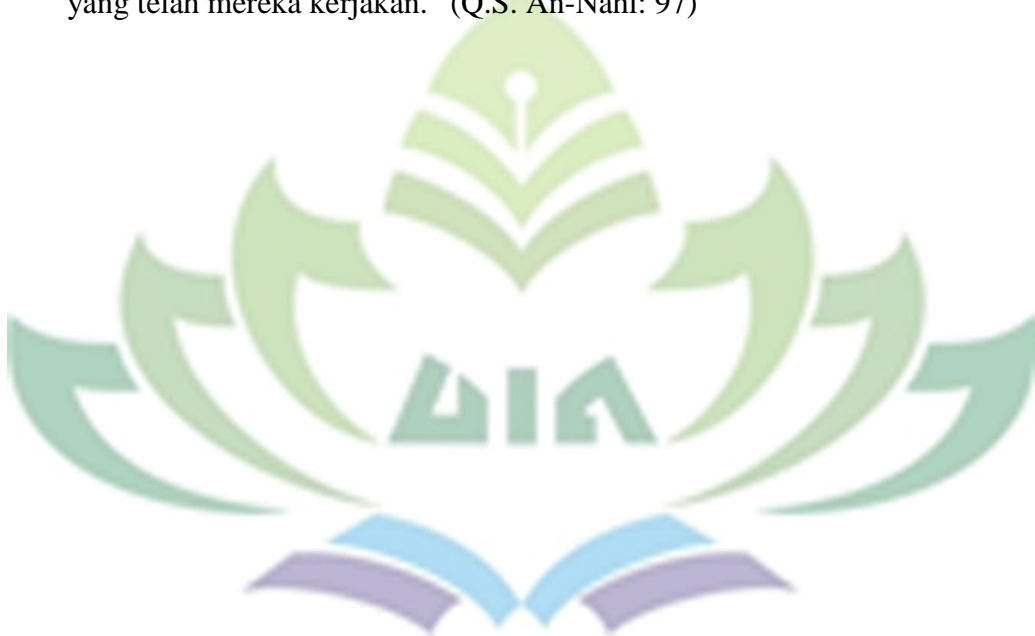
Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 196009011007031002

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Penyayang, Penuh cinta dan kasih yang telah memberikanku kekuatan, dan telah menuntun kejalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayah, Ibu dan Paman ku, sebagai kekuatan dan penyemangat dihari-hariku, Pelita dalam hidupku, dan pengukir sejarah dalam keberhasilanku.
2. Kakak-kakakku tersayang, Ricky Ria Ficardo, Susi Riyanti.
3. Keluarga besar dari kerabat Ibu dan Ayah.
4. YM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan Ke-23.
5. Keluarga besar UIN Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar Pergerakan, PMII UIN Raden Intan Lampung.
7. Keluarga besar Mulli Mekhanai Paksi Sekala Brak Lampung.
8. Keluarga besar Kerajaan Adat Sekala Brak Kepaksian Pernong.
9. Almamaterku tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Penulis Skripsi ini bernama Adinda Sisca Novalia, dikenal dengan sapaan siska/icis, adalah buah hati dari Bapak Mukhlis. Hs. S.Pd. dan Ibu Lekok Asmara, serta keponakan dari Paman Akmal. Penulis dilahirkan pada tanggal 05 September 1997 di Desa Way Semangka Pekon Bedudu Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Penulis merupakan anak terakhir dari ketiga bersaudara yaitu Ricky Ria Ricardo dan Susi Riyanti.

1. Penulis mulai menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Bedudu dan lulus pada tahun 2008.
2. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Belalau dan lulus tahun 2012.
3. Kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Belalau dan mengambil jurusan Ilmu Sosial, Penulis selalu mendapatkan peringkat pertama dan terbaik kedua di jurusannya, serta pernah mengikuti lomba olimpiade bidang Geografi mewakili SMA nya yang pada saat itu dilaksanakan di SMAN 1 LIWA. Penulis lulus tahun 2015.
4. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yang terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara). Penulis juga aktif diberbagai kegiatan mahasiswa seperti di PMII Rayon Syari'ah Komisariat

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, DEMA Fakultas Syari'ah dan Dema Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di luar dari konteks akademisi, penulis juga aktif dan mempunyai peranan yang cukup penting dibidang kesenian dan kebudayaan khususnya di internal kerajaan adat sekala brak Lampung. penulis dipercaya untuk memimpin dan menahkodai lembaga kemahasiswaan dibawah bimbingan humas kerajaan sekala brak kepaksian pernong yaitu sebagai Ketua Mulli Mekhanai Paksi Sekala Brak Lampung.

5. Saat ini tujuan yang paling utama bagi penulis adalah, bagaimana agar supaya semua mimpi-mimpi dan keinginannya selama ini tidak akan pernah disapa dengan kata “tidak mungkin dan mustahil”.

Penulis,

SISCA NOVALIA
NPM. 1521020172

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK (STUDI DPD GOLKAR KOTA BANDAR LAMPUNG)”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para umat yang senantiasa istiqomah berada di jalan-Nya.

Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

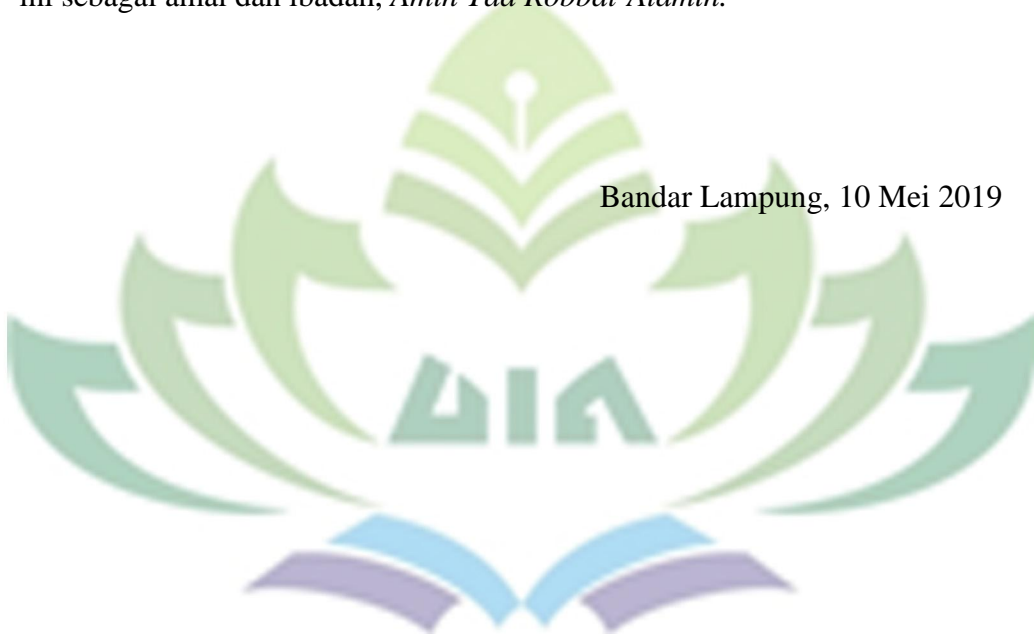
1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Dr. Alamsyah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag. dan Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta civitas akademika Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Keluarga besar dirumah yang selalu mensupport dan mendukung penuh perjalananku.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara) angkatan 2015. Khususnya kelas tempatku menuntut Ilmu dibangku perkuliahan, kelas siyasah C dan siyasah A, teman-teman seperjuangan KKN kelompok 100 desa Bangunsari Lampung Selatan, teman-teman seperjuangan PPS kelompok 28 Pengadilan Agama Tanjung Karang, semoga kesuksesan akan selalu membersamai kita semua.

8. Bapak dan Ibu Pengurus DPD Golkar Kota Bandar Lampung yang telah menerima dan menyambut kedatangan penelitian skripsi saya dengan ramah dan baik.

Saya sebagai penulis berharap semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah kepada yang telah memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini, dan dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai amal dan ibadah, *Amin Yaa Robbal'Alamin*.

Bandar Lampung, 10 Mei 2019



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II PERAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN	
PARTAI POLITIK MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Sejarah Partai Politik dalam Islam	15
B. Sejarah Peran Perempuan dalam Perpolitikan	37
C. Peran Perempuan Pada Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang	42

1. Pengertian Peran Perempuan dan Partai Politik	42
2. Hak-Hak Perempuan dalam Partai Politik	47
3. Peran Perempuan dalam Partai Politik	51

BAB III GAMBARAN UMUM DPD GOLKAR KOTA

BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Partai Politik Golkar	55
B. Struktur Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung	59
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung	66
D. Peran Perempuan Pada Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung	68

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik DPD Golkar kota Bandar Lampung	75
B. Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik DPD Golkar kota Bandar Lampung Berdasarkan Pandangan Hukum Islam	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Rekomendasi	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK (STUDI DPD GOLKAR KOTA BANDAR LAMPUNG)”**.

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan lain-lain untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, duduk perkaranya, dan sebagainya, untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman yang relevan.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²
3. Peran adalah serangkaian aspek dinamis kedudukan (status) yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), Edisi Keempat, h. 58.

² Ngainin Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Bandung: Teras, 2009), h.16.

dia menjalankan suatu peranan.³ Sedangkan perempuan adalah seseorang yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.⁴ Dengan demikian pengertian peran perempuan adalah serangkaian perilaku seorang perempuan yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

4. Kepengurusan adalah orang-orang yang berhubungan atau bersangkutan-paut dalam pembagian bidang masing-masing di suatu lembaga, Partai adalah perkumpulan (sekelompok orang) yang seases, sehaluan, dan menjalani ideologi tertentu dengan tujuan yang sama.⁵ Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional.⁶ Dengan demikian kepengurusan partai politik adalah sekelompok orang yang terhimpun dalam sebuah wadah yang mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan ideologi tertentu untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum yang termenajemen dan terstruktur berdasarkan kepengurusannya.

Berdasarkan pengertian beberapa istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah suatu upaya penyelidikan secara mendalam berdasarkan pandangan hukum Islam tentang sudah berjalan

212. ³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Op., Cit, h. 753.

⁵ *Ibid*, h. 392.

⁶ *Ibid*, h. 793.

sebagaimana prosedur atau belumnya Peran Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis untuk membahas masalah ini sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Berdasarkan fakta bahwa peran perempuan belum sepenuhnya maksimal dan posisi perempuan di lembaga pemerintahan terlihat kurang profesional. Keterwakilan perempuan dalam partai politik juga masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan laki-laki.
- b. Kajian tentang peran perempuan dibahas karena sesuai dengan fenomena yang terjadi pada saat ini, demi mengetahui pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan pada kepengurusan partai politik.

2. Alasan Subjektif

- a. Tersedianya literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan judul ini.
- b. Objek kajian pembahasannya sesuai dengan kesyarifan khususnya sesuai dengan Jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Pada saat abad ke-20 terjadi perubahan struktur peran pada perempuan di Indonesia. Ide dan pemikiran dari Barat masuk bersamaan dengan diperkenalkannya dan disebarluaskan pendidikan cara Barat. Etika politik yang

dijalankan oleh kaum perempuan pemerintahan Hindia-Belanda mulai terdengar, walaupun jumlahnya masih terbatas, namun mulai adanya perempuan yang berkesempatan menikmati pendidikan Barat tersebut.⁷

Kemudian hadirilah orang-orang yang sadar akan diri dan statusnya. Kesadaran mereka pun tumbuh bahwa mereka hidup dibawah kaum penjajah dengan praktek-praktek kolonialnya, seperti R.A Kartini, Ny. Ahmad Dahlan, Dewi Sartika, dan Hj. Rasuna Said. Semuanya merupakan tokoh perempuan dari kalangan elite modern di Indonesia. Pendidikan dan pengetahuan yang mereka peroleh menyadari akan keadaan kaumnya. Dengan berbagai cara, mereka berusaha untuk menyadari hal itu akan kedudukan dan perannya dalam masyarakat maupun dalam lembaga pemerintahan. Meningkat pada abad ke-21 peranan perempuan semakin baik, yang menarik adalah bahwa peluang bagi perempuan untuk menjabat atau menempati jabatan-jabatan pada partai politik semakin meningkat.

Pembahasan mengenai perempuan selalu menarik dan aktual untuk diteliti, khususnya berkaitan dengan peran perempuan pada partai politik golkar DPD kota Bandar Lampung, hal ini dilihat dari cukup banyaknya perempuan yang dijadikan bukanlah sebagai subjek tetapi hanya dijadikan objek dalam partai politik yang telah dilakukan, kebijakan yang dilakukan tidak inspiratif dan tidak representatif terhadap kaum perempuan.

⁷ Abdul Djalil, Dkk, *Op., Cit*, h. 73.

Dalam dunia politik, di Indonesia sendiri ada Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Politik PDI Perjuangan sekaligus Mantan Presiden Indonesia Kelima, Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, Khofifah Indar Parawanasa sebagai Menteri Sosial, Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan (Yohana Yembise).⁸

Sedangkan di Lampung terdapat pula beberapa perempuan yang mengisi peranannya seperti Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung dan Wakil Bupati Pesisir Barat Erlina Aznur. Mereka semua adalah perempuan-perempuan yang duduk dikursi pemerintahan, memiliki kekuasaan penuh terhadap jabatannya, dan memegang atau yang mengurus kepentingan masyarakat banyak, serta masih banyak lagi perempuan-perempuan yang menempati posisi strategis lainnya.

Walaupun sudah banyak perempuan-perempuan hebat yang lahir didalam dunia politik, perempuan masih menjadi kenyataan sosial yang tidak terbantahkan, hal ini tentunya tidak terlepas dari kompleksitas permasalahan yang berhubungan dengan persoalan perempuan sendiri. Para pemerhati kajian perempuan mengemukakan bahwa posisi-posisi perempuan disamping karena

⁸ Abdul Djalil, Dkk, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), Cetakan 1 Juni 2000, h. 72.

faktor-faktor ideologi dan budaya yang memihak kepada laki-laki, boleh juga dijustifikasi oleh kaum agamawan.⁹

Peran perempuan dalam partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung kerap kali masih menjadi persoalan, walaupun persentase perempuan yang terlibat dalam partai politik juga semakin banyak yaitu mencakup minimal 30% keterwakilan perempuan. Akan tetapi masih saja ada asumsi-asumsi masyarakat yang menganggap bahwa perempuan banyak menghambat ruang gerak laki-laki serta tidak mampu berperan dengan baik dalam melaksanakan tugas kepengurusan partai.¹⁰

Terlepas dari kontroversi di atas, Indonesia dan juga negara-negara lainnya dalam upaya peningkatan peran dan kedudukan perempuan terus berlanjut. Salah satu upaya nyata perhatian negara terhadap perempuan ialah perempuan pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam pembangunan disegala bidang khususnya di partai politik.

Pada dasarnya perempuan mempunyai hak untuk bekerja dalam berbagai bidang secara konstitusional, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 3 dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.¹¹ Disamping itu, dilihat dari Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yakni pada Pasal 2 ayat yang menyatakan

⁹ Husen Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), h. 23.

¹⁰ Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 138.

¹¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2011), Cet-1, h. 29.

bahwa keterwakilan perempuan pada partai politik itu sekurang-kurangnya 30% dari keseluruhan setiap partai politik.

Jika dianalisa, benar bahwa ketentuan tersebut telah menunjukkan dukungan yang sangat kuat dari pemerintahan terhadap perempuan untuk ikut serta ataupun terlibat dalam partai politik Artinya, ini merupakan aturan yang positif dari aturan tersebut.

Namun, jika dilihat dari sisi yang lain. Kuota yang mengharuskan 30% disetiap partai politik membuat sebuah persoalan yang baru. Karena terlepas dari apakah perempuan tersebut berintegritas, ahli di bidangnya dan mengetahui dunia perpolitikan menjadikan itu sebuah dinamika yang baru, karena bisa saja yang terpenting bagi sebuah partai politik adalah bagaimana syarat-syarat tersebut mampu mereka penuhi.

Persoalan-persoalan perempuan juga tidak terlepas dari peran agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah rasul sebagai pedoman dan sebagai pengatur aktivitas pemeluk Islam. Persoalan ini kerap menjadi perbincangan menarik apabila jabatan yang strategis dipegang oleh seorang perempuan sehingga menghadirkan sebuah perdebatan-perdebatan diberbagai kalangan masyarakat.

Persoalan perempuan dalam partai politik Golkar DPD kota Bandar Lampung merupakan hal yang aktual untuk dikaji. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan ternyata masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi

kejadian maupun peran yang diemban dalam perihal partai politik.¹² Peran perempuan dalam partai politik kerap kali masih menjadi pokok persoalan. Dimana kecenderungan penilaian bahwa normativitas Islam menghambat ruang gerak perempuan dalam masyarakat. Hal ini didukung bahwa tempat terbaik bagi perempuan adalah didalam rumah, sedangkan untuk diluar rumah tidak diperbolehkan karena banyak terjadi kemudharatan.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”. (Q.S an-Nisa: 34).

Ayat Al-Qur'an seperti dalam surah an-Nisa diatas seringkali salah dalam pemahamannya, banyak pemikiran menganggap bahwa kepemimpinan hanya untuk kaum laki-laki dan menegaskan bahwa perempuan harus mengakui

¹² Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), Cetakan ke-2, h.1.

kepemimpinan dari laki-laki.¹³ Padahal, dalam penafsirannya tentu harus kita kaitkan terlebih dahulu bahwa ayat tersebut masuk ke dalam konteks ibadah atau dalam hal-hal yang lainnya.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dengan berdasarkan hukum Islam mengenai apakah benar bahwa peran perempuan pada kepengurusan partai politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu tentang tugas, fungsi dan peranan daripada perempuan tersebut atau hanya sebagai bentuk formalitas saja demi tercapainya dari kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Partai Politik.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung?

¹³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), Cetakan ke-13, h. 313.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk Mengetahui Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung.
 - b. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai bentuk berbagi ilmu kepada para pembaca untuk mengetahui peran perempuan pada kepengurusan partai politik
 - b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁴ Dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancan kehidupan yang sebenarnya. penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.¹⁵ Disini penulis akan terjun langsung ke lapangan dimana penulis akan meneliti secara hukum Islam bagaimana peran perempuan pada kepengurusan partai politik Golkar di kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif Analitis*, yang dimaksud *deskriptif* adalah metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.¹⁶

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah yang sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 33.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 29.

melakukan obsevasi.¹⁷ Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi di kantor partai politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung. Selain itu juga dilakukan wawancara secara mendalam terhadap objek penelitian.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 80 pengurus partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari kepengurusan partai politik Golkar DPD di kota Bandar Lampung sebanyak 8 pengurus, yaitu ketua umum, sekretaris umum, ketua harian, ketua bidang perempuan, wakil ketua bidang perempuan, wakil ketua bidang ekonomi kreatif, Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ketua Bidang Keagamaan. Penentuan sampel dikantor partai politik Golkar dengan menggunakan penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.²⁰ *Interview* dilakukan kepada informan yaitu anggota-anggota dari pada partai politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung.

¹⁷ Kartini Kartno, *Op., Cit.* h. 28.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 32.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Op., Cit.* h. 202.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h.192.

b. Metode observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²¹ Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau keadaan objek yang akan diteliti di kantor partai politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung.²²

c. Metode Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data melalui arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen disini termasuk untuk menghimpun data tentang situasi di lapangan.

5. Metode pengolahan data

Setelah semua sumber data diatas terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah yang sistematis kemudian diolah melalui tahapan pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*).

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir *deduktif* yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit.

²¹ *Ibid*, h. 136

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 192.

Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik ke generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.²³

Penelitian ini dilakukan dengan cara memaparkan informasi-informasi yang akurat dan berkaitan dengan peran perempuan dalam partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung serta dilihat dari sudut pandang hukum Islamnya. Kemudian mengevaluasi dengan beberapa teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.



²³ Lexi. J. Meleong. *Op.,Cit*, h. 205.

BAB II

PERAN PEREMPUAN PADA KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Sejarah Partai Politik dalam Islam

Sejak pada masa Rasulullah, keberadaan partai politik sudah ada dan menjadi hal yang diwajibkan. Kewajiban ini sesuai dengan seruan Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”²⁴ (Q.S. Al-Imran: 104)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan tegas, Allah SWT memerintahkan akan adanya umat, yang berarti berkelompok atau dikenal juga dengan istilah berorganisasi dengan tujuan untuk menegakkan perintah Allah yaitu menyerukan ajaran Islam, baik dalam konteks menerapkan Islam secara kaffah, maupun mengajak orang non Muslim agar bersedia memeluk agama Islam dengan keikhlasan dan niat yang tulus.

Partai politik masa Rasulullah sangat mengedepankan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam, menyerukan yang makruf, dan mencegah dari tindak kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakatan maupun negara.²⁵

²⁴ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108

²⁵ Abu Abdillah al-Qurthubiy, *al-Jami li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo Dar al-Kitab al-Arabiyy, 1967) Juz 4, h. 48

Secara umum, aktivitas partai politik ini ialah berdakwah, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Namun, lebih spesifik dalam konteks sistem pemerintahan, fungsi dan peran partai politik ini adalah untuk melakukan *check and balance*. Selain itu, sering disebut juga peran dan fungsi *muhasabah Li-al'hukkam* (mengoreksi penguasa).

Peran dan fungsi ini sangat menentukan keberlangsungan penerapan Islam yang diterapkan oleh khilafah karena para penguasa dalam negara khilafah adalah manusia biasa. Mereka tidak maksum, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Karena itu mereka berpotensi melakukan kesalahan, terlebih dengan kekuasaan yang memusat ditangan mereka. Ketika ketakwaan yang menjadi benteng mereka melemah, maka kontrol dari rakyat, termasuk partai politik sangat dibutuhkan untuk meluruskan kesalahan-kesalahan mereka.

Partai politik masa khilafah ini adalah partai politik dakwah, yang tidak melakukan aktivitas lain selain berdakwah, karena aktivitas lain adalah aktivitas yang menjadi kewajiban negara, bukan kewajiban partai politik.

Partai politik ini akan memimpin umat, dan menjadi pengawas negara, karena partai ini juga bagian dari umat atau representasi dari umat itu sendiri. Partai ini memimpin umat untuk menjalankan tugasnya, memprotes kebijakan negara, mengoreksi dan mengubahnya dengan lisan dan tindakan. Bahkan jika terjadi suatu kekufuran yang bersifat nyata, partai juga bisa mengangkat senjata atau melakukan *people power*. Inilah entitas yang hidup di tengah-tengah umat, di dalam negara khilafah yang dijadikan oleh Islam sebagai jaminan pelaksanaan

sistem Islam secara sempurna. Rasul mendirikan *Hizb* Rasul, dan *Hizb* Rasul ini tetap eksis meski baginda telah tiada.²⁶

Menurut al-Allamah an-Nabhani, anggota partai politik masa Abu Bakar dan Umar mencapai sebanyak 60.000 orang. Keberadaan partai politik ini tetap dipertahankan di pusat pemerintahan, yaitu Madinah *Al-Munawwarah*. Fungsi dan tugasnya untuk menjaga terlaksananya sistem Islam yang baik.

Namun ketika Usman menjadi khalifah, kebijakan mempertahankan para sahabat di Madinah diubah, sehingga banyak yang mulai keluar dan meninggalkan Madinah. Dan ketika mereka telah tersebar diseluruh penjuru wilayah khilafah, suara mereka pun menjadi terpecah belah. Fungsi dan peranan mereka pun tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, sebagaimana pada zaman Abu Bakar dan Umar, yang pada saat itu mulai muncul guncangan-guncangan hingga berujung pada terjadinya Fitnah Kubra.²⁷

Setelah itu, fungsi dan peran politik terus melemah, pada waktu yang bersamaan tidak ada lagi kontrol yang mengawasi, sampai akhirnya banyak penyimpangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penguasa dalam menerapkan ajaran Islam. Maka perlahan namun pasti, wajah Islam dan khilafah pun mulai tercemar. al-Allamah an-Nabhani menyatakan bahwa, partai politik Islam Ideologi ini merupakan jaminan nyata dalam menerapkan ajaran Islam, mengemban dakwah dan memastikan Islam diterapkan dengan sempurna.

²⁶ Philip K. Hitti, *History of the Arab*, (London: Macmillan Press, 1970), h.120

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), h. 97.

Maka, sesungguhnya keberadaan partai politik dalam negara khilafah ialah merupakan bagian dari sistem pemerintahan itu sendiri. Meskipun partai politik ini tidak menjadi bagian integral dalam struktur pemerintahan, namun keberadaannya sebagai mekanisme kontrol dalam negara khilafah sangat menentukan perjalanan suatu negara.

a. Masa Abu Bakar al-Shiddiq (Politik Konsolidasi)

Abu Bakar adalah pilihan yang paling ideal, dialah yang semenjak awal telah mendampingi Nabi dan paling paham tentang risalah Nabi Muhammad SAW.²⁸ Masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun, 11-13 H (632-634 M, diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin umat Islam sebagai khalifah rasulillah, yaitu menggantikan Rasul melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan.²⁹ Hal-hal yang dapat disimpulkan dari pidato tersebut ialah :

1. Pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai kontrak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Karenanya, Abu Bakar hanya menuntut kepatuhan dan kesetiaan umat Islam kepadanya, selama ia berjalan pada jalan yang benar.

²⁸ Abdullah Amin, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2007, h. 96

²⁹ Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah al- nahdhah al-Misyriyah, 1975), h. 381

2. Abu Bakar meminta kepada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif melakukan kontrol terhadap dirinya. Dalam hal ini Abu bakar menjamin dan memberikan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya.
3. Keyakinan Abu Bakar untuk menegakkan keadilan dan HAM dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesewenang-wenangan yang kuat.
4. Seruan untuk membela negara (jihad) pada saat yang dibutuhkan.
5. Perintah untuk tetap menjalankan shalat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat.³⁰

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, pada satu sisi memberikan keuntungan tersendiri bagi berlanjutnya pemerintahan negara Madinah. Namun pada sisi lain munculnya penolakan orang-orang Arab, terutama orang-orang yang baru masuk Islam.³¹ Penentangan terhadap negara Madinah yang dilakukan oleh suku-suku Arab merupakan sebuah realitas bangsa Arab yang sangat sulit menerima kebenaran, sangat sulit untuk tunduk pada ajaran yang baru, yang tidak umum berkembang pada lingkungan mereka.³²

Berikut gerakan oposisi dan penentangan mereka yang disebut Riddah :

- a. Gerakan melepas kesetiaan kepada ajaran Islam, kembali kepada kepercayaan semula. Gerakan riddah ini secara politik merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan.

³⁰ Haikal, *Abu Bakar*, h. 71.

³¹ *Ibid.*, h. 85

³² *Ibid.*, h. 98.

- b. Gerakan menolak membayar zakat. Penolakan mereka membayar zakat disebabkan pandangan salah mereka tentang zakat yang dikira pajak.
- c. Gerakan yang mengangkat diri mereka menjadi nabi: seperti yang dilakukan Musailamah al-Khazzab (pendusta) yang menyatakan bahwa Nabi telah mengangkat dirinya sebagai mitra di dalam kenabian. Di Yaman muncul orang-orang yang mengaku Nabi, yaitu Aswad Ansi dan Sajjah ibn Haris.
- d. Gerakan dari suku-suku pembangkang yang mengklaim bahwa Islam adalah agama bangsa Arab semata. Mereka berusaha meraih kembali kemerdekaan.³³

Melihat kondisi bangsa Arab dalam wilayah kekuasaan Islam yang menolak terhadap kekhalifahan Abu Bakar bahkan penolakan terhadap Islam, maka orientasi politik yang dijalankannya pertama kali adalah melakukan konsolidasi, mempersatukan masyarakat Arab dalam kekuasaannya dan dalam keagamaan Islam serta tetap dalam menjalankan ajaran agama. Terhadap gerakan riddah kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Abu Bakar melancarkan operasi pembersihan terhadap mereka dengan melakukan tekanan dan ajakan kembali ke jalan Islam, Namun ketika mereka menolak barulah dilakukan peperangan. Begitu juga ketika menghadapi orang yang tidak mau membayar zakat dan nabi-nabi palsu. Tindakan Abu Bakar adalah melakukan pembersihan, menumpas serta memerangi mereka.

³³ Masudun Hasan, *History of Islam*, (India: Adam Publisher, 1992) Jilid 1, h.164

Perang riddah melawan kemurtadan yang berjalan alot berhasil dimenangkan oleh pemerintah Abu Bakar di bawah pimpinan Khalid ibn Walid. Namun di samping itu semua, banyak dari penghafal Al-Qur'an yang tewas dalam perang tersebut. Melihat suasana ini Umar merasa cemas, dan mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Qur'an. Abu Bakar pada awalnya tidak menyetujui usulan ini karena tidak ada otoritas dari Nabi untuk membukukan Al-Qur'an. Namun kemudian ia setuju dan memberikan tugas tersebut kepada Zaid bin Tsabit untuk menuliskannya.³⁴

Perilaku politik lain yang dijalankan Abu Bakar adalah melakukan ekspansi. Ekspansi yang dilakukan pemerintahan Abu Bakar yaitu :

- a. Ekspansi ke wilayah Persia di bawah pimpinan Khalid ibn Walid. Dalam ekspansi ini (tahun 634 M), pasukan Islam dapat menguasai dan menaklukkan Hirah, sebuah kerajaan Arab yang loyal kepada Kisra di Persia.
- b. Ekspansi ke Romawi di bawah empat panglima perang yaitu Ubaidah.³⁵

Ketika pasukan Islam sedang menghadapi peperangan di Front Sirian Damascus, Baalbek, Homs, Hama, Yerussalem, Mesir dan Mesopotamia, Abu Bakar meninggal dunia, Senin 23 Agustus 634 M, setelah menderita sakit selama beberapa hari. Dalam menjalankan politik pemerintahannya selama 2

³⁴ Syalabi, A. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Alhusna. 1987, 45-50

³⁵ Fathiyah Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif,t.tp)

tahun 3 bulan dan 11 hari, Abu Bakar mengedepankan aspek musyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan, sehingga secara internal kondisi pemerintahannya stabil.

Selain itu, Abu Bakar telah melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif, dan yang diangkat adalah Ali, Usman, dan Zaid ibn Tsabit sebagai sekretaris negara (khatib) yang berkedudukan di Madinah. Kemudian Abu Bakar mengangkat Abu Ubaidah sebagai bendahara negara, sedangkan untuk jabatan hakim agung diserahkan kepada Umar ibn al-Khaththab. Sementara dalam membantu khalifah memutuskan urusan-urusan kenegaraan, Abu Bakar juga membentuk majelis syura yang terdiri dari Umar, Usman, Ali, Abd al-Rahman ibn Awf, Mu'adz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b dan Zaid ibn Tsabit.

b. Masa Umar ibn al-Khattab (Politik Ekspansi)

Umar ibn Khattab ibn Nufail ibn Abd Al Uzza merupakan keturunan dari Adi, salah satu suku bangsa Quraisy yang terpandang mulia. Ia lahir lebih muda 4 tahun dari Rasulullah di Mekah.³⁶ Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun, dari tahun 13-23 H (634-644 M). Sebagai pembuka awal setelah dilantik menjadi khalifah, Umar berpidato di hadapan umat Islam untuk menjelaskan visi politik dan arah kebijakan yang akan dilaksanakannya dalam memimpin kaum Muslimin. Isi pidato tersebut berbunyi :

³⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 114

“Aku telah dipilih menjadi khalifah. Kerendahan hati Abu Bakar sejalan dengan jiwanya yang terbaik di antara kalian dan lebih kuat dari kalian serta juga lebih mampu memikul urusan-urusan kamu yang penting. Aku diangkat menjadi khilafah tidak sama dengan beliau. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih kuat untuk memikul jabatan ini dari padaku, maka aku lebih suka memilih memberikan leherku dipenggal daripada memikul jabatan ini”

Setelah dilantik menjadi kepala negara, Umar segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Secara prinsip, Umar melanjutkan garis kebijaksanaan yang telah ditempuh Abu Bakar. Namun karena permasalahan yang dihadapi Umar semakin berkembang seiring dengan perluasan daerah Islam, Umar melakukan berbagai kebijaksanaan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tantangan yang dihadapinya. Kebijakan yang dilakukan Umar sebagai kepala negara meliputi pengembangan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tentara regular yang digaji oleh negara. Tulisan berikut mencoba mengekolaborasikan kebijaksanaan tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana sistem ketatanegaraan yang dilaksanakan oleh khilafah Umar.³⁷

Luasnya daerah kekuasaan Islam ini membuat Umar merasa perlu membenahi dan menyempurnakan sistem pemerintahan yang telah dijalankan khalifah Abu Bakar sebelumnya. Umar mengadakan pembaharuan signifikan dalam bidang administrasi negara. Dengan tetap menjadikan kota Madinah sebagai pusat pemerintahan Islam. Umar meminta kepada sahabat senior *al-*

³⁷ Sulaiman Muhammad al-Thamawi, *Umar ibn Khathab wa Ushul al-Siyasah wa al-Idarah al-Hadistsah*, (Kairo: Dar al-Arabi,t.tp.), h. 242.

Sabiqun al-Awwalun untuk tidak meninggalkan kota Madinah. Umar membutuhkan tenaga mereka untuk memberikan masukan-masukan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Para sahabat senior inilah yang menjadi anggota “majelis syura” sebagai teman bermusyawarah atau penasihat untuk menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik. Anggota lembaga ini, selain mereka yang menjabat dalam masa pemerintahan sebelumnya, ditambah juga dengan beberapa sahabat-sahabat lainnya. Umar juga menetapkan Usman ibn Affan sebagai sekretaris negara.

Pada masa Umar, lembaga-lembaga penting seperti departemen untuk pertama kalinya mulai dibentuk. Umar membentuk tim kepolisian *Diwan al-Ahdats* untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan lembaga pekerjaan umum *Nazharat al-Nafi'ah* yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit. Lembaga pengadilan juga sudah berdiri sendiri dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. kemudian Umar juga membentuk departemen perpajakan (*al-Kharaj*) dan departemen “pertahanan dan keamanan” (*Diwan al-Jund*).³⁸

Dalam masa pemerintahan, Umar melakukan beberapa langkah politik. Langkah politik ekspansi merupakan langkah yang paling populer selama pemerintahan Umar. Langkah ini harus dilakukan karena pasukan Islam sudah menyebar ke beberapa wilayah yang dikirim oleh pemerintahan Abu Bakar.

³⁸ *Ibid.*, h. 243.

Umar sangat tahu sekali kondisi psikologi pasukan Islam yang punya semangat dakwah yang sangat tinggi untuk menyerukan ajaran-ajaran agama ke seluruh penjuru dunia, selain karena bangsa Arab (kaum Badui) terbiasa dengan kehidupan berpindah-pindah (nomad) dan suka berperang. Penyatuan antara kedua aspek dakwah, nomad dan suka berperang dari pasukan Islam, akhirnya digunakan untuk melakukan ekspansi dan dengan cepat dapat menundukkan wilayah kekuasaan Romawi dan Persia satu peratu.³⁹

Langkah politik kedua sebagai akibat dari penyerbuan pasukan Islam ke daerah dari kekuasaan Romawi dan Sasania adalah mengkonsentrasikan pasukan Islam hanya digunakan untuk menjalankan penaklukan dan untuk membentengi wilayah yang telah ditundukkan.

Langkah politik ketiga yang dilakukan Umar ibn Khattab adalah pasukan Islam tidak diperbolehkan memaksakan warga taklukan untuk memeluk agama Islam. Prinsip ini sudah pernah dijalankan pada masa Rasulullah yang memberi izin kepada pemeluk Yahudi dan Kristen tetap berpegang pada agamanya, dengan catatan mereka harus membayar upeti. Gubernur yang dikirim hanya ditugasi untuk menangani pengumpulan pajak dan upeti, mengawasi distribusi pajak sebagai gaji tentara dan memimpin peperangan serta pelaksanaan shalat berjama'ah. Namun dalam perkembangannya ada perubahan dalam pengaturan terkait dengan urusan sosial dan administrasi kenegaraan, meskipun dalam penerapan antara satu

³⁹ *Ibid.*, 257

provinsi dan lainnya berbeda. Di Iraq seluruh wilayah dikuasai dan diurus negara Khurasan, dikuasai oleh penguasa lokal, di Mesir menghapus otonomi kekayaan fiskal, dan di kota mengatur administrasi yang mandiri.

Langkah politik keempat adalah didasari oleh keberhasilan meluaskan jajahan yang membawa implikasi pada membanjirnya harta-harta, baik rampasan, upeti, pajak dan lainnya. Untuk memudahkan urusan administrasi dan keuangan, maka dalam pemerintahannya dibentuk lembaga-lembaga dan dewan-dewan, seperti *Bait al-Maal* (perbendaharaan negara), pengadilan dan pengangkatan hakim, jawatan pajak, penjara, jawatan kepolisian juga membuat aturan pembagian gaji kepada tentara dan tentara cadangan, pemberian gaji kepada guru-guru, muadzin dan imam, pembebanan bea cukai, pemungutan pajak atas kuda yang diperdagangkan, pungutan pajak atas orang-orang Kristen bani Tighlab sebagai ganti jizyah. Umar juga menempa mata uang dan tahun hijrah yang dimulai dari hijrah Rasul.⁴⁰

Pemerintahan khalifah Umar yang berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan dan 40 hari, dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis, selain karena dia meletakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya dengan jalan membangun jaringan pemerintahan sipil. juga bersifat egaliter dengan menjamin persamaan hak dalam bernegara, tidak membedakan antara atasan dan bawahan, penguasa dan rakyat.

⁴⁰ Abbas Mahmud Al Akkad, *Aqariyatu Umar*, Terj. Gazirah Abdi Ummah “Kejeniusan Umar”, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002, h. 95.

Suatu Ketika, pada saat akan menjalankan shalat shubuh, seorang budak berkebangsaan Persia bernama Feros atau Abu Lulu'ah secara tiba-tiba menyerang Umar dan menikam dengan pisau. Khalifah terluka yang sangat parah dan setelah 3 hari dari peristiwa penikaman tersebut, Umar wafat pada tanggal 1 Muharram 23 H. kemudian pasca wafatnya Umar, berdasarkan hasil musyawarah dan persetujuan, maka yang diangkat mejadi khalifah setelah Umar ialah Usman. Usman pun di baiat menjadi khalifah ketiga dalam usia 70 tahun.

Dari sistem sistem pemilihan yang telah dilakukan para sahabat, Kekuatan politik Islam pun semakin kuat, tidak akan ada perpecahan dalam tubuh umat Islam. seperti halnya Abu Bakar, karena ia telah meletakkan sendi-sendi demokrasi dan memperkuat *daulah Islamiyah*. Oleh sebab itu, Umar memberikan kesempatan kepada sahabat sepeninggalnya untuk melaksanakan sistem musyawarah yang digariskannya dalam memilih penggantinya.⁴¹

c. Masa Usman ibn Affan (Politik Sentralistik dan Nepotisme)

Usman bin Affan ibn Abdul al Ash ibn Umayyah berasal dari bani Umayyah, walaupun tidak dimasukkan dalam dinasti Umayyah yang berkuasa setelah Khalifah Ali. Ia lahir di Mekah dari trah bangsawan Mekah yang sangat dihormati, dua tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad atau seusia Abu Bakar. Usman merupakan sahabat nabi yang sangat kaya raya tetapi

⁴¹ *Islam Abu Bakar dan Umar*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h. 234.

berlaku sederhana dengan lebih menggunakan kekayaannya untuk kejayaan Islam.⁴²

Sebagaimana halnya kedua khalifah sebelumnya, Usman juga menyampaikan pidato kenegaraan saat pelantikannya sebagai khalifah. Isi pidato tersebut berbunyi⁴³ :

“Sesungguhnya engkau sekalian hidup di negeri yang fana dan berada dalam pemerintahan yang tidak kekal. Karena itu, segeralah berbuat baik sekuat dan semampumu untuk menyongsong batas kehidupanmu. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang penuh tipu daya. Jangan kalian terseret olehnya. Janganlah tipu daya itu melalaikan kalian dari Allah. Ambillah pelajaran dari peristiwa-peristiwa masa lampau, kemudian kamu bersungguh-sungguhlah dan jangan kalian lalai. Sesungguhnya Allah tidak pernah lengah terhadap kalian. Adakah orang-orang yang tinggal dan menikmati kehidupan di dunia ini yang kekal abadi? Jauhkanlah dunia ini, sebagaimana diperintahkan-Nya, raihlah kebahagiaan akhirat. (kemudian Usman mengutip ayat Al-Qur'an surah al-Kahfi, 18:15 yang mengumpamakan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit, dengan air tersebut ditumbuhkannya lah tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, tumbuhan tersebut kering ditiup angin”.

Pidato tersebut tidak seperti pidato dua khalifah sebelumnya, pidato ini tidak memperlihatkan visi politik Usman yang jelas dalam menjalankan pemerintahannya, namun lebih bersifat kepada nasehat orang tua kepada anak-anaknya. Kalau diteliti lebih lanjut, Usman terlihat seperti bukan seorang negarawan. Selama hidupnya Usman dikenal sebagai pengusaha yang sukses dan banyak menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan Islam. Memang dari dua cucu Abd al-Manaf yakni Umayyah dan Abd al-Muthalib, yang pertama (Umayyah) lebih banyak bergelut di bidang bisnis. Inilah darah

⁴² Jalaluddin al-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafa*, (Kairo: Dar al-Nahdhah, t.tp.), h. 247.

⁴³ *Ibid.*, h. 249

yang diwarisi Usman menjadi khalifah dapat diartikan sebagai kemenangan Bani Umaiyah dan Bani Hasyim. Di samping itu, usia yang sudah uzur juga merupakan faktor mengapa Usman tidak memperlihatkan visi politiknya secara jelas.⁴⁴

Di samping penguasa daerah tersebut, Usman juga mengangkat Abu al-Darda sebagai hakim agung dan Uqbah ibn Amr sebagai bendaharawan negara. Selain penaklukan di atas, Usman juga membuat kebijaksanaan perluasan al-Masjid al-Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Untuk perluasan Masjid Nabawi, Usman melakukan pembebasan tanah penduduk sekitar dengan mengeluarkan ganti rugi sebesar 10.000 dinar. Usman juga menempuh kebijaksanaan memperbanyak mushaf Al-Qur'an dan mengirimkannya untuk beberapa daerah. Kebijakan ini berawal dari perbedaan kaum Muslimin dari berbagai daerah yang luas tersebut dalam membaca Al-Qur'an menurut dialeg daerah masing-masing dan *qira'ah* yang berbeda. Di Hamsh dan Syam mereka membaca berdasarkan *qira'ah* Miqdad ibn al-Aswad. Sementara di Bashrah, penduduknya membaca berdasarkan *qira'ah* Abdullah ibn Mas'ud. Sedangkan penduduk kufah membacanya dengan *qira'ah* Abu Musa. Perbedaan ini hampir saja menimbulkan perpecahan di tubuh umat Islam. Akhirnya Hudzaifah al-Hudzaifah al-Yamani mengusulkan agar segera diadakan penyeragaman dalam membaca Al-

⁴⁴ Al-Thabary, *Tarikh al-Thabari*, Juz V, h.35

Qur'an. Usman menyetujui setelah dahulu memusyawarakannya dengan sahabat lainnya.

Dalam bidang politik, banyak sejarawan yang menilai Usman melakukan praktik sistem nepotisme. Ia mengangkat pejabat-pejabat dari kalangan keluarganya, meskipun tidak layak memegang jabatan tersebut. Banyak pejabat lama yang dipecatnya, awal praktik nepotisme ini adalah pemecatan al-Mughirah ibn Abi Syu'bah sebagai gubernur Kufah dan digantikan oleh Sa'd ibn al-Ash, saudara sepupu Usman, namun Sa'd hanya setahun menduduki posnya karena digantikan oleh al-Walid ibn Uqbah yang juga saudara seibu dengan Khalifah. Ternyata Walid ini berperangai buruk dan tidak mencerminkan teladan seorang pejabat. Ia suka mabuk dan pernah melakukan shalat subuh empat rakaat karena mabuk.⁴⁵

Dari sistem pemerintahan yang dijalankan oleh Usman, dapat disimpulkan beberapa cacatan. *Pertama*, kebijakan Usman lebih mengutamakan kaum keluarganya untuk menduduki jabatan penting adalah karena kepercayaannya yang terlalu besar kepada mereka. Usman sangat selektif melihat orang yang bukan keluarganya untuk memegang tugas pemerintahan. Barangkali ini juga didasari oleh wataknya yang seorang pengusaha. Biasanya, orang yang bergelut di dunia usaha sangat sulit mempercayai orang lain yang belum terlalu dikenalnya. Kondisi ini ditambah lagi dengan tidak adanya ketegasan dari Usman terhadap anggota keluarga

⁴⁵ Shiham Musthafa, *al-Khulafa al-Rasyidin*, h. 189

besarnya. Usman tidak berdaya menghadapi ambisi keluarganya yang sudah diluar kontrol. Faktor usia yang tua agaknya menyebabkan Usman tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung ambisi mereka.

Kedua, kebijakannya memberikan izin kepada sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan Madinah. Menyebarnya sahabat-sahabat ke berbagai daerah menyebabkan kontrol terhadap kekuasaan Usman semakin berkurang.⁴⁶ Pada masa Umar, sahabat-sahabat senior dilarang keluar Madinah tanpa izinnnya, karena tenaga dan pikiran mereka dibutuhkan. Namun pada masa Usman, ketika sahabat-sahabat senior yang ikhlas, tulus dan tidak mempunyai kepentingan politik apapun tidak berada di Madinah, yang mengelilingi Usman adalah para ambisius yang haus akan kekuasaan. Akhirnya, karena tidak ada tokoh yang menjadi mitra dialognya, Usman pun dilingkari pejabat-pejabat bermental durno dan tidak memiliki ketulusan dan kesetiaan kepada Usman. Akibatnya, kebijakan politik Usman pun ditempuh berdasarkan kepentingan golongan, tidak dimusyawarahkan dengan orang-orang yang tepat.⁴⁷

Ketiga, besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintahan Usman dapat dipahami dalam konteks berbedanya perlakuan yang mereka alami antara pemerintahan Umar dan Usman. Pada masa Umar rakyat merasakan keadilan, hak-hak mereka diperhatikan. Bahkan mereka

⁴⁶ Quthb Ibrahim Muhammad, *Al-Siyasah al-Maliyah li Usman ibn Affan*, h.158

⁴⁷ Jalaluddin al-Suyuti, *Tarikh al-Khulafa*, h. 240

dapat secara langsung menyampaikan kontrol dan kritik, baik terhadap pejabat-pejabat negara maupun terhadap Umar sendiri sebagai khalifah. Umar sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya, ia cepat tanggap terhadap laporan-laporan penyelewengan pejabatnya dan langsung menghukum mereka yang salah.⁴⁸ Sementara dalam pemerintahan Usman, rakyat melihat pola hidup pejabat-pejabat negara yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap mereka. Rakyat dibebani dengan berbagai pajak, sedangkan pejabat negara hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya. Subsidi pemerintahan pun dikurangi dari biasanya. Ini menimbulkan rasa tidak puas dan frustrasi di kalangan rakyat. Klimaksnya adalah peristiwa tragis pembunuhan khalifah Usman di tangan umat Islam sendiri.

d. Masa Ali bin Abi Thalib

Ali ibn Abi Thalib ibn Abdul Muthalib, sepupu Nabi Muhammad dan menantunya karena Ali menikah dengan Fatimah binti Muhammad. Ali merupakan sahabat nabi semenjak anak-anak. Ketika berumur 12 tahun telah masuk Islam dan mengakui risalah. Sebagai seorang anak dari Abu Thalib secara materi terlihat sangat kekurangan, namun tertimpa dengan ketauladanan ayahnya yang berakhlak mulia dan terhormat, Ali mempunyai watak yang lebih mementingkan aspek spiritual, sehingga sepanjang

⁴⁸ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1987), Jilid 5, h. 448.

sejarahnya Ali lebih berkonsentrasi pada perjuangan menegakkan Islam, keagamaan dan keilmuan tanpa menoleh sedikitpun pada aspek duniawi.⁴⁹

Masa pemerintahannya berlangsung selama 5 tahun, dari 36-41 H (656-661 M), diwarnai oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan-pemberontakan. Pengangkatannya sebagai khalifah tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah dialami oleh khalifah-khalifah sebelumnya, hal ini disebabkan karena Usman tidak sempat menunjuk pengganti atau membentuk dewan formatur untuk memilih khalifah. Ali diangkat melalui proses pembai'atan langsung yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Madinah secara terbuka di masjid termasuk dihadiri kaum Muhajirin dan Anshar.⁵⁰

Menurut Munawir Syadzali setelah pembunuhan Usman, kota Madinah dalam kondisi yang sepi dan kosong karena banyak ditinggal oleh para sahabat ke wilayah yang baru ditaklukkan. Hanya sedikit para sahabat yang masih tinggal di kota Madinah dan tidak semuanya mendukung Ali, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqash dan Abdullah ibn Umar. Mu'awiyah Amr ibn 'Ash serta Aisyah ra. menganggap tidak sah dengan pembai'atan. Namun demikian, Ali tetap dianggap sah menduduki jabatan khalifah, karena didukung oleh sebagian besar rakyat. Setelah pelantikan, Ali menyampaikan pidato visi politiknya dalam suasana yang kacau di Masjid Nabawi, yang berbunyi :

⁴⁹ Abbas Mahmud Al Akkad, *Op.Cit*, h. 112.

⁵⁰ Abdullah Amin, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2007, h. 115.

“Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* telah menurunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk yang menjelaskan yang baik dan yang buruk. Ikutilah kebaikan dan ikutilah kejahatan. Kalau engkau menjalankan kewajiban yang digariskan-Nya, maka kelak engkau akan masuk surga. Allah mengharamkan apa-apa yang telah diharamkan-Nya dan memuliakan kehormatan manusia dan menekankan keikhlasan serta tauhid umat Islam. Orang Islam harus memberikan kesejahteraan bagi manusia lainnya dengan perkataan dan perbuatannya. Karenanya, janganlah kamu menyakiti orang lain. Segeralah melaksanakan kepentingan sosial”.

Hal pertama yang dilakukan Ali setelah menjadi khalifah adalah memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat oleh Usman dan menarik kembali tanah yang dibagi-bagi oleh Usman kepada kerabatnya. Dalam hal yang pertama, Ali mengangkat Usman ibn Junaif menjadi gubernur Bashrah menggantikan Abdullah ibn Amir, Umarah ibn Syihab gubernur Kufah menggantikan Sa’d gubernur Mesir, Abdullah ibn Sa’d ibn Abi Sarh dan Sarh ibn Junaif gubernur Syam. Gubernur-gubernur yang baru tidak dengan mulus dapat masuk menggantikan pejabat lama.⁵¹

Adapun kebijakan yang kedua, membuat Ali mendapat tantangan keras dari mereka yang digeser kedudukannya. Di sisi lain, penduduk Madinah tidak bulat mendukung Ali, posisi Ali benar-benar sulit, ia terjepit di antara keinginan untuk memperbaiki situasi negara yang sudah *chaos* dengan ambisi lawan-lawan politiknya yang selalu berusaha menjegalnya. Melihat kondisi Madinah yang tidak mungkin baginya untuk menjalankan pemerintahan, Ali memindahkan ibu kota ke Kufah. Disini Ali mendapat dukungan dari rakyat. Sementara itu, di Syam, Mu’awiyah dikabarkan telah

⁵¹ *Ibid.*, h. 129.

bersiap-siap dengan pasukannya untuk menghadapi Ali. Ali segera menyiapkan pasukan untuk menyerah Mu'awiyah, namun sebelum rencana tersebut terlaksana, ternyata trio Aisyah, Thalhah dan Zubeir telah bersiap pula untuk memberontak kepadanya. Terjadilah perang Jamal (unta). Dalam peperangan ini, pasukan Ali yang didukung masyarakat Anshar, masyarakat Kufah dan Mesir dapat memenangkan peperangan. Aisyah tertawan dan dikembalikan ke Madinah, sedangkan Thalhah dan Zubair terbunuh ketika hendak melarikan diri bersama 20.000 kaum muslim yang gugur.

Adapun terhadap Mu'awiyah ibn Abi Sufyan yang tidak mengakui kekhalifahannya dan menolak meletakkan jabatannya sebagai gubernur di Suriah, Ali melakukan tindakan penyerangan terhadap penguasa Suriah itu. Peperangan terjadi di Shiffin, dekat Sungai Euphrat pada tahun 37 H. Dalam peperangan ini sebenarnya pasukan Mu'awiyah telah terdesak kalah dengan terbunuhnya 700 orang. Namun dalam kondisi yang terdesak ini Mu'awiyah yang mempunyai siasat lihai mengangkat Al Qur'an sebagai tanda meminta damai dengan cara *tahkim* (arbitrase).

Dalam *tahkim* diusulkan agar Ali dan Mu'awiyah meletakkan jabatan yang diklaim mereka. Karena Musa al-Asyar sebagai wakil dari Ali lebih tua daripada Amr ibn Ash wakil Mu'awiyah, maka dia lebih dahulu menyampaikan pidato. Namun ketika Amr ibn Ash menaiki mimbar, bukannya yang diucapkan tentang penurunan Mu'awiyah sebagaimana

kesepakatan semula, tetapi mengucapkan penerimaan turunya Ali sebagai khalifah dan mengangkat Mu'awiyah sebagai khalifah.

Peristiwa *tahkim* yang semula diharapkan dapat mengakhiri peperangan di antara kaum Muslim, namun kenyataannya dengan penurunan Ali dan menaikkan Mu'awiyah membuat kedudukan Mu'awiyah sejajar dengan khalifah Ali dan menyulut pertikaian baru, dengan munculnya kelompok khawarij, orang-orang yang keluar dari barisan Ali dan menegaskan ketidaksetujuannya terhadap *tahkim* bahkan berusaha membunuh Ali dan Mu'awiyah karena keduanya tidak berhukum pada hukum Allah SWT.

Dengan demikian, umat Islam terpecah lagi ke dalam 4 golongan, yaitu Mu'awiyah, Syi'ah (Ali), Khawarij serta kelompok yang tidak ikut dalam pertikaian politik dan lebih *concern* pada kesalehan dan ilmu. Dan dengan keluarnya Khawarij dari mendukung Ali, maka menjadi lemahlah kekuatan Ali sehingga Mu'awiyah dapat memperluas pengaruh dan kekuasaannya bukan saja di Suriah tetapi juga di Mesir. Hal ini membuat Ali menyetujui perjanjian dengan Mu'awiyah yang mengakui kekuasaan atas Suriah dan Mesir.⁵²

Meskipun masa pemerintahan Ali selama 6 tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan egaliter. Dalam sikap egalitarian, Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya.

⁵² H.A Dzajuli, *Fiqh Siyasah, Kencana*, (Jakarta, 2017), h. 28.

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak dan tetap yakin pada pendiriannya. Meskipun demikian, menurut Nurcholish Madjid, pemerintahan Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan (populisme), di samping kesungguhannya di bidang keilmuan.

B. Sejarah Peran Perempuan dalam Perpolitikan

Sejak pada masa Nabi Muhammad Saw, kaum perempuan sudah mulai memiliki peran politis dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat Allah, seperti melakukan dakwah Islam, ikut berhijrah bersama Nabi, berbai'at dan melakukan jihad atau ikut serta dalam peperangan bersama kaum laki-laki. Semua hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad Saw, mengikutsertakan perempuan di dalamnya. Dalam berbagai peristiwa hijrah, perempuan memiliki peran yang cukup penting. Kaum perempuan juga melakukan bai'at yang bersamaan di hadapan Nabi dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan juga terlibat aktif dalam kegiatan dakwah Islam sehingga banyak perempuan kafir Quraisy yang kemudian menjadi muslimah karena ajakan mereka. Begitu juga dalam hal jihad atau peperangan, sebagian besarnya menyertakan perempuan di dalamnya.⁵³

Dalam mengatur urusan pemerintahan, perempuan belum banyak berperan pada masa ini, mengingat karena hanya Rasulullah Saw. yang mempunyai otoritas

⁵³ Ubadah bin As-Shamit oleh Az- Zuhaili, hlm. 29

tertinggi.⁵⁴ Namun peran *Ummahat al-Mu'minin* (kelompok Perempuan) cukup besar dalam memberikan masukan-masukan kepada Nabi dalam memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan.⁵⁵

Ummu Harom binti Milhan bin Khalid Al-Anshariyah, adalah satu dari perempuan-perempuan mulia yang diabadikan oleh sejarah, perempuan-perempuan yang mempunyai peran penting dalam Islam. Ia menjadi salah satu pelaku sejarah Islam di Madinah. Ummu Harom termasuk perempuan Anshar generasi pertama yang memeluk Islam. Ia termasuk diantara mereka yang diakui kebaikannya oleh Allah Swt. Dalam Al-Qur'an surah At-Taubah Allah Swt berfirman :

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾

Artinya : “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” (Q.S. At-Taubah: 100)

Ummu Harom dikenal sebagai seorang shahabiyah yang bertakwa, dia adalah wanita yang mulia. Karena itulah Rasulullah sangat memuliakannya.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 39

⁵⁵ Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi Ashr al-Risalah*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 42

Dalam setiap peperangan, ummu Harom selalu terlibat dalam barisan paling depan. Ia telah berjanji akan terus setia kepada Rasulullah. Sampai pada suatu ketika sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah menjanjikan mati syahid dalam peperangan di laut kepada Ummu Harom. Ummu Harom begitu senang mendengar kabar gembira itu. Bayangan akan kesyahidan selalu nampak dalam wajahnya. Ummu Harom terus menunggu kapan waktunya itu tiba. Sampai pada zaman Khulafa'ur Rasyidin tepat pada masa Utsman bin Affan, di zaman inilah terjadi ekspansi besar-besaran. pertempuran besar terjadi di Cyprus berada tepat ditengah-tengah laut. Bersama dengan suaminya, Ummu Harom ikutserta dalam peperangan ini. Disinilah ingatan Ummu Harom terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kenangan akan kabar dari Rasulullah bahwa ia akan berperang di laut dan akan syahid dalam peperangan tersebut.

Ketika Ummu Harom turun dari kapal menuju ke pantai dengan menaiki *bighal* nya. *Bighal* itu mengamuk dan ia terlempar hingga meninggal dunia. Tercapailah cita-cita sang mujahidah, begitulah Ummu Harom ra. meraih kesyahidan di tengah-tengah pertempuran tersebut.⁵⁶

Perempuan hebat selanjutnya bernama Ummu Aiman Barakah binti Esa'labah.⁵⁷ Dalam diri Ummu Aiman ra. terdapat banyak sifat-sifat terpuji padanya. Salah satu sifat mulia itu adalah kepeduliannya terhadap jihad. Meskipun usianya telah senja, ia tidak pernah absen dari jihad bersama Rasulullah

⁵⁶ Thabaqat Ibnu Sa'd. hlm. 8

⁵⁷ As-Sirah Al-Halabiyah. hlm. 85

dan para pahlawan Islam dalam menghadapi orang-orang musyrik.

Pada perang uhud, Ummu Aiman ra. berangkat bersama perempuan hebat lainnya. Tugasnya adalah merawat dan mengobati pasukan Islam yang terluka dan memberi minum para mujahidin yang kehausan. Ketika ia sedang mengobati orang yang terluka, sebuah anak panah mengenai tubuhnya. Namun Ummu Aiman tetap menahan rasa sakit itu dan tetap melanjutkan tugasnya.

Perempuan hebat selanjutnya bernama Aisyah ra. Ia menghimpun dalam dirinya berbagai ilmu dan keutamaan. Aisyah ra layak menjadi teladan yang baik karena banyak meninggalkan hal yang penuh dengan keberkahan yang dapat dirasakan hingga saat ini. *Ummul Mu'minin* adalah panggilan agung yang diberikan Allah kepada Aisyah. pernikahannya dengan Rasulullah terjadi atas perintah Allah melalui wahyu menyusul wafatnya perempuan suci, Khadijah ra.⁵⁸

Satu sisi yang mengundang kekaguman kepada Aisyah ra. yaitu ia selalu ikut terlibat di medan jihad seperti perempuan-perempuan lainnya. Mereka bertugas dalam batas-batas tertentu, seperti memberi minum pasukan, merawat tentara yang terluka, dan menyiapkan logistik. Ketika terjadi perang Uhud Aisyah ra. ikut memanggul air untuk memberi minum para mujahidin, padahal saat itu usianya masih sangat belia. Tetapi ia tetap ikut melakukannya. Aisyah ra ditemani Ummu Sulaim Nampak bergerak dengan cekatan, mereka membawa wadah-wadah air di atas perut mereka. Kemudian memberikannya kepada tentara kaum muslimin.

⁵⁸ Jumu'ah, Ahmad Khalid, *Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Syurga*. Hlm. 91

Dalam perang Khandaq, Aisyah ra. juga menunjukkan keberanian dan ketegaran yang sangat jarang dimiliki oleh seorang perempuan. Aisyah ikut keluar dan berada dibarisan tentara kaum muslimin. Pada masa terjadinya kekacauan, baik pada masa Utsman bin Affan maupun pada masa Ali bin Abi Thalib. Perempuan yang paling banyak berperan dalam melakukan rekonsiliasi umat Islam adalah Aisyah ra. problem besar yang dihadapi pada masa Khulafaur Rasyidin adalah bahwa yang saling bertikai pada saat kekacauan itu merupakan sesama Muslim yang diperbuat oleh kaum munafik, seperti yang dimotori oleh Abdullah bin Saba'.⁵⁹ Abdullah lah yang menyebarkan provokasi ditengah-tengah umat Islam, sehingga umat Islam termakan dan mengalami kekacauan yang cukup panjang.

Keikutsertaan beberapa wanita hebat ini menandakan bahwa peran perempuan adalah sejajar dengan laki-laki dalam hal membela Islam. Hal ini membuat politis perempuan juga terangkat dengan sendirinya.⁶⁰ Kaum perempuan juga aktif memainkan peran-peran politis yang lain pada masa Khulafaur Rasyidin. *Ummahat al-Mu'minin* menjadi motor penggerak kaum perempuan pada waktu itu untuk aktif dalam peran-peran politik tersebut.

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam QS. Al-Taubah (9)/71:

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 97

⁶⁰ Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press. Cet. I, h. 66.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Taubah: 71).⁶¹

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerjasama bahu membahu antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Seperti halnya dalam membela Islam ketika masa peperangan di zaman Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin.

C. Peran Perempuan Pada Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang

1. Pengertian Peran Perempuan dan partai politik

Peran merupakan tanggung jawab utama yang berupa aktivitas perempuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di partai politik. Peran dalam ilmu sosial terkait mengenai peran aktif yang berdampak positif bagi

⁶¹ Al-Qur'an al-Karim.

keyakinan masyarakat terhadap anggota perempuan dalam partai politik.⁶² Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Menurut Poerwadarminta peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa.

Pengertian tentang peran yang dikemukakan oleh Komarudin dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu usaha.
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada pada dirinya.
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peran menurut Robbins adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit sosial. Menurut Soerjono Soekanto, unsur-unsur peranan atau *role* adalah :

⁶² W. J. S Poerwadarminta. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, h. 751.

1. Aspek dinamis dari kedudukan.
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan.
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.⁶³

Dari teori-teori di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa peran adalah suatu bagian dari tugas utama yang dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban berupa tindakan yang diharapkan dan sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan definisi perempuan ada 2 yaitu dalam pengertian *sex* dan *gender*. Dalam pengertian *sex* merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Pemahaman masyarakat terhadap perempuan mengalami *stereotype* dalam persoalan peran sosialnya. Namun demikian, Nasaruddin Umar memberikan batasan dalam melihat persoalan ini, yakni *gender* lebih menekankan pada aspek maskulinitas atau femininitas, sedangkan *sex* lebih menekankan pada perkembangan dan komposisi kimia dalam tubuh.⁶⁴

⁶³ Sarlito Wirawan Sarjono.2006. *Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi Revisi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, h. 244.

⁶⁴ Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), Cet-1, h.99.

Dari pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa perempuan terdapat dalam 2 konteks yaitu *gender* dan *sex*, namun dalam persoalan ini, peneliti lebih menekankan pada *gender*.⁶⁵ Dalam perkembangan saat ini, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat setiap tahunnya, bahwa terakhir pada tahun 2017 sebanyak 39 persen dari 120 juta pekerja di Indonesia adalah perempuan. *Life style*. Hedonisme dan budaya konsumtif merupakan pemberi pengaruh terbesar bagi kaum perempuan untuk bekerja, serta dengan budaya masyarakat yang mandiri membawa pengaruh bagi perempuan yang belum menikah untuk tidak lagi bergantung pada pemberian orang tua.⁶⁶

Peran perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran pada profesinya dan pada hakikatnya sebagai perempuan. Proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai dan struktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Sedangkan Partai adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

⁶⁵ Mansour Fakih.2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (cetakan ke-13). Yogyakarta. Insist Press, h. 8.

⁶⁶ Hasan Baharun dan Syafiqiyah Adhimiy. 2018. “*Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah*” Jurnal Al- ‘Adalah Vol XXI No 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Indonesia mengenal sistem multi-partai, sekalipun gejala partai-tunggal dan dwi-partai tidak asing dalam sejarah kita. Sistem yang kemudian berlaku berdasarkan sistem tiga orsospol (organisasi sosial politik) dapat dikategorikan sebagai sistem multi-partai dengan dominasi satu partai. Tahun 1998 mulai masa reformasi, Indonesia kembali ke sistem multi-partai (tanpa dominasi satu partai).⁶⁷

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah wadah untuk mencapai tujuan dalam konteks kekuasaan politik yang tidak didominasi oleh satu nama partai saja. Dibagian terdahulu telah disinggung bahwa pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di Negara yang demokratis dan di Negara otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing Negara.

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan di hadapan penguasa. Sebaliknya di Negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.⁶⁸

⁶⁷ Liddle R W, *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Grafiti, h. 12.

⁶⁸ Liza Hadiz (Editor). 2004. *Perempuan Dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta. Pustaka LP3ES Indonesia. H. 399.

2. Hak-Hak Perempuan Pada Partai Politik

Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak-hak perempuan dalam partai politik antara lain :

- a. Hak untuk berpartisipasi dalam partai politik dengan ikut serta dalam perumusan kebijakan partai dan pelaksanaannya.
- b. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keinginan kepada partai, baik tertulis maupun lisan.
- c. Hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan berkala yang bebas untuk menentukan kepengurusan dalam partai.
- d. Hak untuk terlibat dalam jabatan partai dan himpunan-himpunan yang berkaitan dengan lingkungan partai dan perpolitikan.
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan dari partai.

Dasar hukum atas hak-hak perempuan dalam partai politik tersebut dapat ditemukan dalam instrumen internasional. Dimana hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam bahasa yang umum :

1. Pasal 21 DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) tentang hak untuk mendapatkan kebebasan berpartisipasi dalam pemerintahan di negaranya dan mendapatkan pelayanan umum.
 2. Pasal 25 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) dalam
-

perjanjian Internasional tentang hak warga negara dan politik.

3. Pasal 7 dan 8 CEDAW atau ICEDAW (International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) tentang Hak Asasi Internasional yang secara khusus mengatur tentang hak-hak perempuan, norma-norma di setiap negara.
4. Undang-Undang Nomor 68 tahun 1958 tentang Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 yang berbunyi: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Dalam peraturan pemerintah, peran perempuan pada partai politik juga sudah diatur dalam undang-undang yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 2 ayat 2 tentang Partai Politik (Pembaharuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) diubah dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi :

- a. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan

politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
- c. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
- d. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- e. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
- f. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
- g. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

1. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris.

(1b) Pendiri dan pengurus partai politik dilarang merangkap sebagai anggota partai politik lain.

2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.
4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.⁶⁹

Pasal di atas mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Tetang Partai Politik.

lembaga publik.⁷⁰

3. Peran Perempuan dalam Partai Politik

Secara umum dalam partai politik, peran pengurus perempuan sama halnya dengan peran pengurus laki-laki. Dalam pengertiannya, peran pengurus partai yaitu merupakan pelaksanaan antara tugas pokok dan fungsi yang dilakukan pengurus sesuai dengan jabatannya dalam partai politik. Apabila seorang pengurus partai telah melaksanakan tugas-tugas utamanya serta melaksanakan fungsi kepengurusan yang diembannya, maka pengurus tersebut telah melaksanakan perannya dengan benar dan tepat.⁷¹

Namun sebaliknya, apabila tugas-tugas utamanya serta fungsi kepengurusan yang diembannya dilaksanakan dengan tidak maksimal, maka pengurus partai tersebut belum dapat dikatakan menjalankan perannya dengan baik atau belum maksimal terhadap jabatan kepengurusan partai yang diembannya.

Dalam partai politik, terdapat banyak pengurus dengan peran yang beranekaragam, beragamnya peran tersebut disesuaikan dengan masing-masing jabatannya. Peran pengurus perempuan dalam partai politik sama halnya dengan peran pengurus laki-laki, tetapi yang membedakan peran setiap pengurus adalah tugasnya. Tugas itu yaitu untuk menjaga dan memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi,

⁷⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁷¹ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2010, h. 66.

agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional yang diimplementasikan dengan cara :

1. Setiap pengurus melaksanakan tugas masing-masing pada setiap jabatan yang diemban dalam partai dapat dilihat dalam AD dan ART Partai politik.
2. Melaksanakan hasil perumusan partai sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Melaksanakan rapat-rapat kepengurusan partai, rapat harian, paripurna, dan rapat fraksi.
4. Melaksanakan rapat koordinasi PAC (Pimpinan Anak Cabang) atau tingkat Kelurahan.
5. Melaksanakan rapat koordinasi DPC (Dewan Pimpinan Cabang) atau tingkat Kecamatan.
6. Melaksanakan rapat koordinasi DPD (Dewan Pimpinan Daerah) atau tingkat Kabupaten/Kota.
7. Melaksanakan rapat koordinasi DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) atau tingkat Provinsi.
8. Melaksanakan rapat koordinasi DPP (Dewan Pimpinan Pusat) atau tingkat Jakarta.
9. Mensosialisasikan visi dan misi partai kepada masyarakat.
10. Mampu bersaing dan terlibat dalam legislatif.
11. Memenangkan suara partai ketika pemilu (pemilihan umum).⁷²

⁷²Buku Pedoman AD/ART Partai Politik Golkar pasal 14 tentang kader partai politik Golkar.

Karena sifatnya yang selalu mengalami pembaharuan dan teraktual, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dalam setiap partai politik belum ada yang mencantumkan secara konkrit tentang tugas dari kepengurusan partai secara spesifik, melainkan yang dibahas ialah mencantumkan hal-hal yang umum seperti menjalankan kewajiban sesuai dengan jabatannya masing-masing secara benar dan terstruktur, serta mengemban dan mengamalkan pada setiap jabatan kepengurusan yang dipercayakan. Namun menurut Sartono ada dua dasar yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyatakan seseorang telah berperan secara maksimal dalam kepengurusan partai politik yaitu⁷³ :

1. Landasan legal formal yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun yang mengatur sekap terjang pengurus partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya politiknya sesuai yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa pengurus partai politik harus dapat melaksanakan tugas setiap jabatan dengan baik selama masa kepengurusan ditetapkan.
2. Pandangan-pandangan yang direfleksikan dapat ditinjau dari penilaian para petinggi partai yang dihasilkan dari musyawarah para petinggi partai yaitu ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum dan ketua harian.

⁷³ Richard S. Katz dan William Crotty, *Handbook Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2010, h. 86.

Dengan demikian, kepengurusan dalam sebuah partai dapat dikatakan berperan ketika sudah masuk kedalam dua kriteria tersebut. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik juga menyatakan bahwa setiap pengurus dan anggota baik laki-laki dan perempuan berkewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai politik.
- b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan-peraturan organisasi partai politik.
- c. Aktif dalam setiap rapat kepengurusan partai politik.
- d. Aktif melaksanakan kebijakan dan program partai politik.
- e. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi sejenis beserta kegiatan yang terkait dengan bidang dan kelompoknya.
- f. Melakukan kegiatan dalam rangka rekrutmen, penggalangan, pengkaderan dan pengembangan anggota partai politik.
- g. Mempersiapkan kader-kader dalam rangka regenerasi kepemimpinan partai politik.⁷⁴

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

BAB III

GAMBARAN UMUM DPD GOLKAR KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Sejarah Partai Politik Golkar

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekretariat bersama (sekber) Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama GOLONGAN KARYA (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena dorongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu.

Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprpto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Bulan Desember Tahun 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar

adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.⁷⁵ Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
4. Organisasi Profesi
5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)
6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
7. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Setelah Peristiwa G 30 S PKI, Sekber Golkar dengan dukungan dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai

⁷⁵Dokumen Arsip Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

jaringan konstituen, dibina sejak awal orde baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi.

Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat dewan pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi pimpinan pemilu dalam Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pemenang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana.

Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris.

Partai Golkar kemudian ikut dalam pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di era reformasi ini partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP. Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif

2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil munas Bali dan Agung Laksono hasil munas Jakarta.

Pada awal Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono. Pada bulan April 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan putusan sela menunda pelaksanaan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Pada tanggal 10 Juli 2015, empat hakim yang mengadili kasus tersebut, yaitu Arif Nurdu'a, Didik Andy Prastowo, Nurnaeni Manurung dan Diah Yulidar memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie terkait dualisme kepengurusan partai. Putusan itu diambil dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTUN Jakarta. Dengan dibacakannya putusan PTUN itu, kepengurusan Golkar yang sah saat ini adalah hasil Munas Bali yang dipimpin oleh Agung Laksono sebagai ketua umum dan Zainudin Amali sebagai sekjen.

B. Struktur Kepengurusan Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung

STRUKTUR KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK GOLKAR DPD KOTA BANDAR LAMPUNG

No	Nama	Jabatan
1	YUHADI, SHI	KETUA
2	SABNU ALIE	Ketua Harian
3	ISKANDARSYAH KOMARUDDIN, SH., MM.	Wakil Ketua Bidang Organisasi
4	H. AGOES SOELEMEN, SH., MH.	Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan
5	H. BENNY HN MANSYUR, S.Sos., SH.	Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu
6	SENO AJI, S.Sos., MH.	Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga
7	A. FIRMAN HADYTAMA	Wakil Ketua Bidang Diklat, Litbang dan Kajian
8	HETTI FRISKATATI, SE.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
9	Hj. DOLLY SANDRA, SP.	Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
10	Hj. DARMAWIKA	Wakil Ketua Bidang Perempuan
11	SUPRIYANTO ERWANDI, SE.	Wakil Ketua Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial
12	ANSORI, SH., MH.	Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM
13	AL FASNI BIMA	Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan
14	ARTATI KARTIKA DEWI	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
15	H. RUSFIAN RAZI, S.Sos.	Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UKM
16	Drs. SUWONO, Spd.	Wakil Ketua Bidang Keagamaan
17	JAMHARI	Wakil Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
18	BENSON WERTHA, SH.	Wakil Ketua Bidang Eksekutif dan Legislatif
19	ALI WARDANA, SIP.	SEKRETARIS
20	MIFTAHUL HUDA, SE., MM.	Wakil Sekretaris Bidang Organisasi
21	HARVEN, SDA, SE.	Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi

		dan Keorganisasian
22	YUDHA SUKARYA	Wakil Sekretaris Pemenangan Pemilu
23	SLAMET RIYADI, S.Sos.	Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga
24	ISMADA SAPUTRA	Wakil Sekretaris Bidang Diklat, Litbang dan Kajian
25	HIKMAT GUNANSYAH	Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif
26	M. SYAHRUDIN	Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga
27	Hj. TITIN MARLINA, SS., MM.	Wakil Sekretaris Bidang Perempuan
28	M. ZAIDIR HASAN	Wakil Sekretaris Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial
29	FAJAR S MELIANA, SS., MM.	Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM
30	M, SUKRI NAWAWI, ST.	Wakil Sekretaris Bidang Pekerja Tani dan Nelayan
31	NOVI HASAN IZHAR	Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata
32	MARTHA SARI, SE.	Wakil Sekretaris Bidang Koperasi dan UKM
33	M. NIZAR ROHMAN, S.As.	Wakil Sekretaris Bidang Keagamaan
34	Drs. YUNTARDI	Wakil Sekretaris Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
35	I GEDE EKA PRADINATA	BENDAHARA
36	CRISTOPAN, S.Pd	Wakil Bendahara
37	Ir. HERLINA SUUD	Wakil Bendahara
38	SOPAANY ZEMMY	Wakil Bendahara
39	M. TITO DARWANTO	Wakil Bendahara
40	MARLINA WANCIK CANDRA	Wakil Bendahara
41	IWAN IRAWAN	Wakil Bendahara
42	SURATMIN	Wakil Bendahara
43	AMELIA NANDA, SH.	Wakil Bendahara
44	RENI VALENZA, SE.	Wakil Bendahara
45	MAULIDYA HERLITA	Wakil Bendahara
46	EVA SYARI, SE.	Wakil Bendahara
47	HENI BAHARUDDIN	Wakil Bendahara
48	EKA WAHYUNI	Wakil Bendahara
49	YULIANTI	Ketua Bidang Organisasi
50	ROASIDA, SH.	Anggota Bidang Organisasi

51	EVA YULIS SETYORINI	Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan
52	M. SAERA PAHLAWAN	Anggota bagian Kaderisasi dan Keanggotaan
53	ARYONO AGUS PRASETYO, S.Kom	Ketua Bagian Pemenangan Pemilu
54	Hj. SA'DIYAH	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
55	BOBBY YOLANDA MALIK	Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga
56	ZAINAL ARIFIN	Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
57	ANDI PUTRA	Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
58	DEN ALI	Anggota Bagian Pemuda dan Olahraga
59	LUTFI, BBA	Ketua Bagian Diklat, Litbang dan Kajian
60	IRSANI ALFAN	Anggota Bagian Diklat, Litbang dan Kajian
61	SRI MUJIYATI	Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
62	EKA TRAVILTA OKTARIA, SE.	Anggota Bidang Ekonomi Kreatif
63	SAMSUDDIN	Ketua Bagian Hubungan Antar Lembaga
64	DOES HAMDANI, Amd. Kep.	Anggota Bagian Hubungan Antar Lembaga
65	SUMARNI	Ketua Bagian Perempuan
66	TINA HANDAYANI	Anggota Bagian Perempuan
67	CHAIRUL ULUM	Ketua Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial
68	H. FAJAR M IKHWAN	Anggota Bidang Kesra dan Kerawanan Sosial
69	A.YASIN	Ketua Bidang Hukum dan HAM
70	AGSFA FIRHIN NANDA	Anggota Bidang Hukum dan HAM
71	M. NASIR	Ketua Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan
72	AL RUSDI	Anggota Bidang Pekerja, Petani, dan Nelayan
73	WIWIN SETIAWATI, S.Pd.	Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
74	SURAHMI	Anggota Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
75	WAHYU DIRJO	Ketua Bidang Koperasi dan UKM
76	ROSICE SUGITO	Anggota Bidang Koperasi dan UKM
77	DRA. Hj. TATIK RAHAYU	Ketua Bidang Keagamaan

	NINGSIH, M.Sos. I	
78	Hj. HERIYATI, S.Sos	Anggota Bidang Keagamaan
79	SUNARSIH	Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
80	EMA FAUZIAH	Anggota Bidang Infokom dan Penggalangan Opini

Sumber 1.1 : Tabulasi Data Partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung

**NAMA PENGURUS PEREMPUAN
PARTAI POLITIK DPD GOLKAR
KOTA BANDAR LAMPUNG**

No	Nama	Jabatan
1	SUMARNI	Ketua Bagian Perempuan
2	Hj. DARMAWIKA	Wakil Ketua Bidang Perempuan
3	Hj. TITIN MARLINA, SS., MM.	Wakil Sekretaris Bidang Perempuan
4	TINA HANDAYANI	Anggota Bagian Perempuan
5	SRI MUJIYATI	Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
6	HETTI FRISKATATI, SE.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
7	EKA TRAVILTA OKTARIA, SE.	Anggota Bidang Ekonomi Kreatif
8	Hj. DOLLY SANDRA, SP.	Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga
9	ARTATI KARTIKA DEWI	Wakil Ketua Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
10	NOVI HASAN IZHAR	Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata
11	MARTHA SARI, SE.	Wakil Sekretaris Bidang Koperasi dan UKM
12	YULIANTI	Ketua Bidang Organisasi
13	ROASIDA, SH.	Anggota Bidang Organisasi
14	EVA YULIS SETYORINI	Ketua Kaderisasi dan Keanggotaan
15	DRA. Hj. TATIK RAHAYU NINGSIH, M.Sos. I	Ketua Bidang Keagamaan
16	Hj. HERIYATI, S.Sos	Anggota Bidang Keagamaan

17	Hj. SA'DIYAH	Anggota Bagian Pemenangan Pemilu
18	SURAHMI	Anggota Bidang Pariwisata dan Seni Budaya
19	SUNARSIH	Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
20	EMA FAUZIAH	Anggota Bidang Infokom dan Penggalangan Opini
21	Ir. HERLINA SUUD	Wakil Bendahara
22	MARLINA WANCIK CANDRA	Wakil Bendahara
23	AMELIA NANDA, SH.	Wakil Bendahara
24	RENI VALENZA, SE.	Wakil Bendahara
25	MAULIDYA HERLITA	Wakil Bendahara
26	EVA SYARI, SE.	Wakil Bendahara
27	HENI BAHARUDDIN	Wakil Bendahara
28	EKA WAHYUNI	Wakil Bendahara

Sumber 1.2 : Tabulasi Data Partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung

Berdasarkan susunan struktur kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung periode 2016-2021 di atas, dapat disimpulkan bahwa diketahui ada 80 orang yang masuk dalam kepengurusan partai. Pengurus laki-laki sebanyak 52 orang, dan pengurus perempuan sebanyak 28 orang. Jika dipersenkan maka, jumlah pengurus perempuan adalah $28/80 \times 100\% = 35,5\%$. Artinya kuota 30% keterwakilan pengurus perempuan dalam partai politik Golkar telah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Dalam setiap partai tentunya memiliki pembagian dalam setiap bidangnya, sehingga di dalam partai politik DPD Golkar ini telah memiliki struktural yang cukup jelas. Kepengurusan yang pertama ialah posisi sebagai Ketua, ada 2 posisi

Ketua di dalam kepartaian, yaitu Ketua DPD dan Ketua Harian. Ketua DPD mempunyai tugas menyampaikan pertanggungjawaban pengurus pada akhir masa kepengurusan, menetapkan susunan kepengurusan satu periode, menetapkan kebijakan operasional kepengurusan, dan menetapkan program kerja tahunan.

Sedangkan tugas dari Ketua Harian yaitu, melaksanakan tugas rutin harian partai, menyelenggarakan rapat-rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan partai, melaporkan aktivitas sehari-hari pada Ketua DPD, dan bertanggung jawab kepada Ketua DPD. Posisi Ketua Harian ini pun baru ditetapkan dalam rapat paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua Bali kemarin. Dalam Munas Bali kemarin ditetapkan bahwa adanya posisi Ketua Harian tidak hanya di pusat melainkan di DPD tingkat I maupun tingkat II. Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung “Ketua umum bisa menunjuk Ketua Harian, karena tidak sedikit Ketua Golkar khususnya yang berada di daerah merangkap jabatan sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Oleh sebab itulah pada pemilihan kepengurusan DPD Partai Golkar di Kota Bandar Lampung ini diadakan posisi Ketua Harian.

Yuhadi yang menjabat sebagai Ketua saat ini memiliki jabatan mulai periode 2016-2021. Posisi Ketua Harian diisi oleh Sabnu Alie. Selanjutnya dalam kepengurusan ini terdapat 16 wakil ketua sesuai dengan masing-masing bidang. Dimana ke 16 wakil ketua ini terdiri dari posisi : Wakil Ketua Bagian Organisasi, Wakil Ketua Bagian Keanggotaan dan Kaderisasi, Wakil Ketua Bagian Pemenangan Pemilu, Wakil Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga, Wakil Ketua

Bagian Diklat, Litbang dan Kajian, Wakil Ketua Bagian Ekonomi Kreatif, Wakil Ketua Bagian Hubungan Antar Lembaga, Wakil Ketua Bagian Perempuan, Wakil Ketua Bagian Kesra dan Kerawanan Sosial, Wakil Ketua Bagian Hukum dan HAM, Wakil Ketua Bagian Tani dan Nelayan, Wakil Ketua Bagian Pariwisata dan Seni Budaya, Wakil Ketua Bagian Koperasi dan UKM, Wakil Ketua Bagian Keagamaan, Wakil Ketua Bagian Infokom dan Penggalangan Opini serta yang terakhir Wakil Ketua Bagian Eksekutif dan Legislatif.

Pada jabatan Sekretaris diisi oleh Ali Wardana, SIP. Selanjutnya posisi wakil sekretaris ada sebanyak 13 orang juga yang mengisi, yakni Wakil Sekretaris Bagian Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Wakil Sekretaris Bagian Pemenangan Pemilu, Wakil Sekretaris Bagian Koperasi Wiraswasta dan UMKM, Wakil Sekretaris Bagian Pendidikan dan Cendekiawan, Wakil Sekretaris Bagian Pemuda dan Olahraga, Wakil Sekretaris Bagian Pemberdayaan Perempuan, Wakil Sekretaris Bagian Seni dan Budaya, Wakil Sekretaris Bagian Kerohanian, Wakil Sekretaris Bagian Tani dan Nelayan, Wakil Sekretaris Bagian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, Wakil Sekretaris Bagian Hukum dan HAM serta Wakil Sekretaris Bagian Komunikasi, Media, dan Penggalang Opini.

Pada jabatan Bendahara diisi oleh I Gede Eka Pradinata. Kemudian posisi wakil bendahara terdapat sebanyak 13 juga, yakni Wakil Bendahara Bagian Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Wakil Bendahara Bagian Pemenangan Pemilu, Wakil Bendahara Bagian Pengabdian Masyarakat, Wakil Bendahara Bagian Koperasi Wiraswasta dan UMKM, Wakil Bendahara Bagian Pendidikan

dan Cendikiawan, Wakil Bendahara Bagian Pemuda dan Olahraga, Wakil Bendahara Bagian Pemberdayaan Perempuan, Wakil Bendahara Bagian Seni dan Budaya, Wakil Bendahara Bagian Kerohanian, Wakil Bendahara Bagian Tani, Nelayan, Wakil Bendahara Bagian Pedesaan dan Daerah Tertinggal, Wakil Bendahara Bagian Hukum dan HAM serta Wakil Bendahara Bagian Komunikasi, Media, dan Penggalang Opini.

Pada struktur kepengurusan ini terdapat 38 orang yang duduk menjadi anggota bagian. Setiap 1 anggota bagian akan diisi dengan 4 orang yang duduk di dalamnya. Misalnya dalam jabatan anggota bagian organisasi, keanggotaan dan kaderisasi terdapat 4 orang duduk yakni Eva Yulis Setryorini, H. Agoes Soeleman, Harvane, dan M. Saera Pahlawan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung

Berdasarkan AD/ART Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung Nomor: VI/Munaslub/Golkar/2016 Bab IV Pasal 7 berbunyi :

Partai GOLKAR bertujuan:

- a. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945.
- c. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, yang menjunjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan AD/ART Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung Nomor: VI/Munaslub/Golkar/2016 Bab IV Pasal 8 berbunyi :

Tugas Pokok Pengurus Partai GOLKAR ialah :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tugas pokok Pengurus Partai GOLKAR adalah menjaga dan memperjuangkan terwujudnya peningkatan segala aspek kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, hukum, serta pertahanan dan keamanan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional.

Berdasarkan AD/ART Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung Nomor: VI/Munaslub/Golkar/2016 Bab IV Pasal 9 berbunyi :

Fungsi Pengurus Partai GOLKAR ialah :

- a. Menghimpun persamaan sikap politik dan kehendak untuk mencapai cita- cita dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mempertahankan, mengemban, mengamalkan, dan membela Pancasila serta berorientasi pada program pembangunan di segala bidang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.

- c. Menyerap, menampung, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat, serta meningkatkan kesadaran politik rakyat dan menyiapkan kader-kader dengan memperhatikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

D. Peran Perempuan Pada Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

Berdasarkan keterangan dari ketua bidang perempuan partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung, yaitu Ibu Sumarni menjelaskan tentang perannya di dalam partai, bahwa Ibu Sumarni selalu aktif melaksanakan rapat-rapat kepengurusan, baik itu yang tingkat cabang maupun yang tingkat pusat. Memunculkan ide-ide atau gagasan baru seperti mengajak para pengurus perempuan untuk pengajian rutin setiap hari Jumat dengan berdiskusi dengan ketua bidang keagamaan. Mengadakan pertemuan-pertemuan, yaitu sosialisasi dengan masyarakat umum untuk memberi pemahaman mengenai dunia politik

Disamping itu juga, sebagai ketua bidang perempuan, Ibu Sumarni selalu melaksanakan dan memperhatikan tugas-tugas dari anggota perempuan di kepengurusan partai. Selama ini tidak ada kendala yang khusus terhadap aktifitas pengurus perempuan di dalam partai, semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun ketika pemilu, Ibu Sumarni melihat keluhan-keluhan dari pengurusnya karena ketika pemilu berlangsung ada hal-hal yang memang harus dicapai, dan dalam pencapaian itu sering tidak mengenal waktu, sehingga sering terjadinya aktifitas sampai di malam hari dan membuat para pengurus perempuan sering meminta dispensasi ataupun izin pulang karena memikirkan kewajiban yang harus

mereka laksanakan di rumah. Namun hal tersebut tidak begitu menjadi masalah karena selalu ada toleransi dalam setiap kebijakan di dalam partai. Ibu Sumarni juga selalu menghimbau supaya para pengurus perempuan harus mempertahankan keaktifannya dalam partai politik. Pengurus perempuan harus bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap generasi muda masa mendatang. Ibu Sumarni juga selalu memberikan nasehat-nasehat kepada pengurus perempuan agar mampu bersaing di dunia modern saat ini, sehingga baik laki-laki maupun perempuan menjadi tiang yang kokoh sebagai penyangga demi tetap terjaganya demokrasi, pemerataan dan keadilan.⁷⁶

Ibu Hj. Darmawika wakil ketua bidang perempuan juga menjelaskan bahwa dalam partai, Ibu Hj. Darmawika selalu berusaha melakukan tugasnya dengan baik. Sebagai wakil dari ketua bidang perempuan, Ibu Hj. Darmawika selalu membantu apa yang menjadi tugas daripada ketuanya, yaitu Ibu Sumarni. Sejauh ini mereka adalah partner kerjasama yang baik, tidak ada perselisihan yang terjadi, karena itulah Ibu Hj. Darmawika seperti ada panggilan hati ketika ada kegiatan-kegiatan dalam kepartaian. Partai Golkar ini bukanlah sekedar partai. Tapi ada sesuatu hal yang bernilai disini. Ibu Hj. Darmawika bahkan mengatakan ini bukan partai, tapi ini adalah keluarganya yang sangat mengutamakan nilai-nilai persaudaraan.⁷⁷

⁷⁶Wawancara Ibu Sumarni selaku ketua bidang perempuan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

⁷⁷Wawancara Ibu Hj. Darmawika selaku wakil bidang perempuan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

Ibu Sri Mujiyati juga menjelaskan tentang perannya di dalam partai, disamping keaktifannya dalam rapat-rapat kepengurusan, rapat harian, paripurna dan sebagainya, ketua bidang ekonomi kreatif ini selalu menciptakan hal-hal yang baru dan kreatif. Selalu ada ide-ide baru yang Ibu sri kembangkan. Peran Ibu sri selalu dibantu dengan wakilnya yaitu Ibu Hj. Dolly Sandra, SP dan para anggota-anggotanya untuk membuat kerajinan-kerajinan yang menghasilkan nilai ekonomis seperti membuat kerajinan dari limbah plastik, membuat ice cream dari buah pisang dan akan membuka usaha makanan siap saji dalam waktu dekat ini. Sejauh ini tak ada kendala yang Ibu Sri dan wakilnya alami. Semua berjalan dengan baik. Kegiatan mereka juga selalu di dukung penuh oleh pengurus-pengurus partai yang lain. Khususnya ketua umum Bapak Yuhadi, S H.⁷⁸

Dalam bidang ekonomi kreatif, Ibu Hj. Dolly Sandra, SP selain aktif membuat kerajinan dari limbah plastik, membuat ice cream dari buah pisang dan akan membuka usaha makanan siap saji, Ibu Hj. Dolly Sandra sebagai wakil juga aktif dalam bisnis makanan dan pakaian online. Sehingga hasil dari karya ibu-ibu di kepengurusan partai dipasarkan secara langsung ke kosumen di pasar-pasar dan di media online.

Ibu Hj. Dolly Sandra, SP. Mengatakan bahwa sumber daya manusia yang aktif, kreatif dan berkinerja dengan baik akan sangat mempengaruhi kualitas kepartaiannya. Baik dalam mencapai visi, misi dan tujuannya karena merupakan

⁷⁸ Wawancara Ibu Sri Mujiyati selaku ketua bidang ekonomi kreatif Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

suatu elemen yang harus diperhatikan oleh pengurus partai. Tanpa adanya kemampuan yang baik maka sulit dalam sebuah partai itu meraih tujuan-tujuan yang hendak dicapai.⁷⁹

Pernyataan serupa juga dibenarkan oleh Ibu Dra. Hj. Tatik Rahayu Ningsih, M.Sos. I selaku ketua bidang keagamaan, bahwa yang terpenting dalam sebuah partai itu adalah dua sisi yang harus sama-sama berfungsi. Merata terhadap semuanya, baik itu pengurus laki-laki maupun pengurus perempuan harus mempunyai wawasan yang luas. Sehingga dalam bidang yang Ibu Dra. Hj. Tatik emban selalu dikemas dengan nuansa-nuansa keislaman. Seperti pengajian rutin pengurus partai politik Golkar setiap hari jumat, baik pengurus laki-laki dan perempuan, santunan kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya.⁸⁰

Bapak Ali Wardana, SIP selaku sekretaris umum juga menyatakan bahwa, tidak ada yang buruk dari kinerja yang dilakukan oleh pengurus partai. Sama halnya dengan pengurus laki-laki. Mereka sangat aktif, terlihat jelas sekali ketika rapat-rapat koordinasi kepengurusan dilaksanakan. Pengurus perempuan sangat ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat-pendapat. Namun ada sedikit permasalahan pada pengurus perempuan di partai Golkar DPD Kota Bandar Lampung ini, bahwa masalah itu adalah ada di waktu. Tetapi hal ini sangat jarang sekali terjadi, karena sebisa mungkin setiap aktifitasnya dilaksanakan di siang hari

⁷⁹ Wawancara Ibu Hj. Dolly Sandra, SP. selaku Wakil ketua bidang ekonomi kreatif Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

⁸⁰ Wawancara Ibu Dra. Hj. Tatik Rahayu Ningsih, M.Sos. I selaku ketua bidang keagamaan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

saja. Sekalipun itu urgent, pengurus inti selalu memberikan toleransi kepada pengurus-pengurus perempuan.⁸¹

Bapak Sabnu Alie, selaku ketua harian yang memimpin rutin aktifitas harian partai juga menyatakan bahwa, Bapak Sabnu Alie sangat memperhatikan sekali keaktifan dari setiap kepengurusan di partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semuanya sangat progresif, ketua dari setiap bidang dari masing-masing pengurus partai selalu mengadakan konsolidasi dengan saya untuk melakukan dan menciptakan hal-hal yang baru. Salah satu ketua bidang yang selalu melakukan konsolidasi dengan Bapak Sabnu Alie selain dari ketua bidang perempuan Ibu Sumarni, ibu Sri Mujiati selaku ketua bidang ekonomi kreatif juga selalu melakukan konsolidasi dengan petinggi-petinggi partai. Salah satunya yaitu Bapak Sabnu Alie, Ibu sri sangat berperan sekali di bidang yang ia tekuni. Ibu sri selalu menciptakan ide-ide yang kreatif seperti mengolah pisang menjadi ice cream, buat limbah plastik menjadi pas bunga dan lain sebagainya. Sehingga setiap minggunya bidang ekonomi kreatif yang di pimpin oleh Ibu Sri selalu mendapatkan anggaran masuk, yang digunakan untuk kas atau anggaran dana dari partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung.⁸²

⁸¹ Wawancara Bapak Ali Wardana selaku sekretaris umum Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

⁸² Wawancara Bapak Sabnu Alie selaku ketua harian DPD Golkar kota Bandar Lampung

Berdasarkan keterangan dari ketua umum DPD Golkar Kota Bandar Lampung. Bapak Yuhadi, S.H menyatakan bahwa tugas-tugas utama dan fungsi-fungsi dari pengurus perempuan di partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung ini sudah cukup baik, anggota-anggota dari setiap ketua bidangnya sangat aktif dalam setiap kegiatan. Dalam rapat-rapat wilayah juga pengurus perempuan sering mewakili partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung. baik itu rapat pengurus tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah dan tingkat pusat. Pengurus perempuan sangat aktif dalam rapat. Pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan yang mereka sampaikan sangat berbobot dan sangat idealis. Merupakan nilai lebih terhadap pengurus perempuan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepengurusan, bapak Yuhadi pernah menerima laporan dari ketua harian yaitu bapak Sabnu Alie, bahwa pengurus perempuan khususnya sering mendapatkan kendala ketika adanya kegiatan di malam hari.

Hal ini membuat bapak Yuhadi harus bisa menerima dan memposisikan diri serta memberikan kebijakan yang seadil-adilnya ketika memang ada dari kepengurusan yang berhalangan untuk mengikuti aktifitas partai di malam hari. Sebenarnya jarang terjadi aktifitas tersebut. Kecuali ketika ada hal-hal yang urgent saja, seperti moment pemilu dan sebagainya.⁸³ Dalam sebuah organisasi maupun kepartaian, tentunya memiliki struktural kepengurusan dan aturan-aturan

⁸³ Wawancara Bapak Yuhadi, S.H Ketua Umum Partai Politik Golkar DPD Kota Bandar Lampung

sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Sehingga dalam setiap bidang di kepengurusan bisa tercapai sesuai harapan partai yang semestinya.

Menurut Bapak Yuhadi, Menjadi seorang pemimpin dalam partai tentu bukan suatu hal yang mudah, terlebih lagi di dalam kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung ini ada sebagian pengurus-pengurus perempuannya. Sehingga sangat membutuhkan sekali nilai-nilai dengan mengedepankan konteks batin ataupun emosional, yang tentunya akan menjadikan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung ini partai politik yang damai dan tenang.⁸⁴ Dengan demikian, apabila hal tersebut sudah terbangun maka untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi setiap kepengurusan bisa dijalankan dengan rasa memiliki tanpa adanya rasa terbebani.

⁸⁴ Wawancara Bapak Yuhadi S.H selaku ketua Umum Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

BAB IV ANALISIS DATA

A. Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditinjau dari dua dasar yang dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menyatakan pengurus perempuan telah berperan secara maksimal dalam kepengurusan partai politik, yaitu landasan legal formal yang merupakan pedoman untuk melakukan kegiatan sehari-hari maupun yang mengatur sepak terjang pengurus partai dalam melaksanakan fungsi-fungsinya politiknya sesuai yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) bahwa pengurus partai politik harus dapat melaksanakan tugas setiap jabatan dengan baik selama masa kepengurusan ditetapkan. dan berdasarkan pandangan-pandangan yang direfleksikan dapat ditinjau dari penilaian para petinggi partai yang dihasilkan dari musyawarah para petinggi partai yaitu ketua umum, sekretaris umum, ketua harian partai. Ketua bidang perempuan, wakil ketua bidang perempuan, ketua bidang ekonomi kreatif, wakil ketua bidang ekonomi kreatif dan ketua bidang keagamaan.

Maka dapat dinyatakan bahwa pengurus perempuan dalam partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung dapat menjalankan peran setiap kepengurusan dengan baik, terlihat dari keaktifan dan kecapan mereka dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing yang terpaut dengan strategi dalam mencapai tujuan bersama dalam kepartaian, tanpa membedakan pengurus laki-laki maupun pengurus perempuan. Masing-masing pengurus laki-laki dan perempuan juga saling bahu-

membahu demi mewujudkan dan tercapainya cita-cita dalam kepartaian. Seperti telah diketahui, masa pergerakan partai politik golkar adalah suatu masa dimana rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan eksistensinya mulai sejak 55 tahun yang lalu sampai saat ini tidak tergerus sedikitpun nama kebesaran partai golkar, meskipun semakin banyaknya partai-partai baru yang mulai bersaing untuk menjadi yang paling unggul.

Berdasarkan AD ART Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung, tentang kepengurusan Partai dijelaskan bahwa :

Ayat (1) yaitu: Pengurus Partai politik mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan kewajiban menjaga dan mengembangkan kejayaan dan keberhasilan sebuah partai.

Ayat (2) yaitu: Pengurus Partai politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu, mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Sebagai pelaksana kegiatan Partai Politik Golkar
- b. Sebagai penyelenggara perumusan kebijakan partai sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam partai politik, keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam berpendapat serta pengambilan keputusan juga menjadi keseimbangan yang baik, terlihat dengan dilakukannya pertemuan formal yaitu rapat kepengurusan, baik itu rapat harian, rapat mingguan maupun rapat bulanan. Tidak ada diskriminasi suara

yang dilakukan, suara pengurus perempuan bahkan sudah menjadi hal yang wajib dalam berdiskusi dan menyuarakan pendapat. Bahkan terkadang pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh kader ataupun pengurus perempuan lebih mudah diterima dibandingkan kader laki-laki.

Pengurus perempuan partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung memang dapat dikatakan pengurus perempuan yang berkompeten, sangat berperan aktif dalam setiap kegiatan, baik dalam kegiatan internal kepartaian maupun dalam wilayah publik. Pengurus perempuan juga di nilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Disamping itu juga, adanya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2 tentang keterwakilan kuota perempuan minimal 30 persen dalam partai politik tidak menjadikan pengurus partai untuk mencari pengurus perempuan yang tidak selektif. Para pengurus partai dibawah pimpinan ketua umum Bapak Yuhadi S.H selalu melakukan perekrutan kader-kader baru dalam kepengurusan dengan tertib dan selektif. Lulus kreteria dan memang mampu serta mempunyai keahlian di dunia politik.

Kemampuan pengurus perempuan sendiri juga memang menentukan secara langsung derajat kebebasannya dalam memilih sesuatu hal yang ingin dilakukan termasuk dalam menjalankan kewajiban dalam kepengurusan, dan menduduki jabatan politik yang strategis, sehingga mereka dapat menjalankan peran-peran yang mereka miliki terutama dalam memperjuangkan haknya.

Eksistensi perempuan dalam menduduki jabatan-jabatan politik memang sudah tidak asing lagi didengar. Banyaknya perempuan-perempuan yang berkompeten menjadikan kekuatan bagi mereka untuk memenangkan suara pemilihan. Tingkat partisipasi perempuan dalam partai politik pun semakin meningkat, tentu terlihat dari meningkatnya jumlah kepengurusan dalam kepartaian setiap tahunnya.

B. Peran Perempuan Pada Kepengurusan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pandangan Hukum Islam

Partai Politik Golkar di kota Bandar Lampung adalah sebuah partai dengan mayoritas pengurus beragama Islam, yang mana di dalam agama tidak ada nash yang melarang perempuan untuk bekerja diluar rumah, artinya perempuan memang benar-benar bisa berperan sebagaimana seharusnya. Jika ia memiliki kompetensi serta sanggup menjalankan amanah, maka sah-sah saja, dengan syarat dan ketentuan dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Allah Swt berfirman dalam surah An-Nahl yang berbunyi :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: 97)

Ayat ini menjelaskan bahwa bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh yang dikerjakan baik laki-laki maupun perempuan harus disertai dengan penuh keimanan.

Politik juga merupakan ladang untuk beramal shaleh, kewajiban beramal shaleh bukanlah dibebankan kepada orang per orang saja, melainkan juga pada semua. Tugas untuk membenahi masyarakat dan memperbaiki kehidupan bukan hanya menjadi tugas dari laki-laki. Allah Swt berfirman :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 71)

Pembebanan kepada laki-laki dan perempuan sebenarnya sama, kecuali memang hal-hal tertentu yang dikhususkan bagi kaum perempuan, misalnya haidh, istihadhah, nifas, persalinan, menyusui dan warisan. Selain itu, keduanya adalah sama-sama hamba Allah Swt yang diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Swt. *Amar ma'ruf nahi munkar* dan mensejahterakan dunia. Laki-laki dan

perempuan pun dianjurkan untuk saling bekerjasama.

Ada beberapa keraguan (*syubhat*) yang menjadi pandangan beberapa orang untuk mencegah perempuan keluar dari rumahnya, apalagi untuk terlibat dalam politik dan parlemen, ini lebih haram lagi menurut mereka. Mereka berdalil dengan ayat,

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Artinya : “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu...” (Q.S. Al-Ahzaab: 33)

Ayat ini dijadikan alasan agar perempuan tidak pergi kemana-mana, hanya di rumah saja. Namun pemahaman itu dapat tertolak karena lima hal ini, yaitu :

1. Ayat tersebut adalah khusus bagi para istri Rasulullah Saw. Sebagaimana tertera dalam ayat sebelumnya, surah al-Ahzaab ayat 32,

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ لَسْتُنَّ كَاٰحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain...” (Q.S. Al-Ahzaab: 32)

2. Para syahabiyah adalah kaum perempuan yang paling bertakwa kepada Allah Swt, paling memahami agama dan paling meneladani istri Rasulullah Saw. Ikut berdakwah, Membantu dan mengobati ketika masa peperangan. Hal tersebut tentu harus diikuti oleh perempuan masa kini. Seperti kaum perempuan harus menguasai ilmu medis di fakultas kedokteran. Apalagi keberadaan perempuan sangat diperlukan untuk mengurus persalinan dan orang yang sedang sakit.

3. Aisyah ra. perempuan yang paling faqih pada zamannya juga keluar rumah, bahkan memimpin pasukan ketika terjadi konflik dengan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal (unta).
4. Para perempuan kafir yang menuntut para perempuan muslim tidaklah cukup hanya melawan mereka di dalam rumah dengan menutup telinga dan mematikan acara televise, tentu kaum perempuan harus keluar mendampingi kaum laki-laki untuk melawan secara umum.
5. Melarang perempuan keluar rumah adalah benar hanya pada kondisi tertentu, yaitu ketika mereka di hukum karena berbuat keji, misalnya berzina. Allah Swt berfirman :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ
فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ
سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (Q.S. An-Nisaa: 15)

Pada abad modern sekarang ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan laki- laki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan, walaupun tidak semua perempuan itu dapat melakukannya, meskipun dahulu perempuan dianggap mustahil dapat mengerjakan pekerjaan di ruang publik dengan alasan lemah fisik dan kemampuan, bukan lagi sesuatu yang mustahil bagi perempuan dalam banyak

urusan karena perempuan mampu melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki dan bisa menjadi patner kerjasama yang baik.

Batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh perempuan yang berkiprah di ruang politik adalah: *pertama*, tugas dan kewajibannya dalam rumah tangga tidak terbengkalai baik sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya; *kedua*, harus ada izin atau persetujuan dari suaminya bila ia seseorang yang telah berkeluarga; dan *ketiga*, tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat dan negatif terhadap diri dan Agamanya. *Keempat* meluruskan niat bahwa yang dilakukan adalah untuk mencari ridha Allah Swt, *dakwah ilallah*, dan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S at-Taubah: 105).

Ayat ini menuju pada laki-laki dan perempuan, Allah juga mensyari'atkan bisnis kepada semua hamba-Nya, karenanya semua manusia diperintahkan untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu laki-laki dan perempuan. Selagi pekerjaan yang dilakukan itu baik dan tidak mendatangkan mudharat, Islam tidak pernah melarang umatnya untuk tidak melakukannya. Namun, dengan tetap

memperhatikan dan menjaga nama baik keluarga dan nilai-nilai Islam di dalamnya.

Islam adalah Agama yang komprehensif, artinya Islam telah menetapkan perempuan dari hak-haknya untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Islam juga menetapkan untuk menegakkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah musyawarah, prinsip persamaan hak dan kewajiban, prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, dan prinsip mendasar bagi setiap warga negara yang dijadikan Islam sebagai dasar yang baku dalam menentukan hukum Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perempuan dalam partai Golkar ini dinilai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, para perempuan juga sangat berperan aktif dalam kegiatan partai di masing-masing bidang yang ada. Teruji dengan kecakapan para pengurus perempuan dalam memaparkan pendapat dan menyampaikan ide-ide yang baik. Dalam partai politik Golkar DPD kota Bandar Lampung ini, kepengurusan yang berjumlah 80 pengurus memiliki sebanyak 28 pengurus perempuan. Jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 2, pemenuhan minimal 30% keterwakilan untuk perempuan sudah memenuhi kriteria dalam sebuah partai politik.
2. Pandangan hukum Islam terhadap peran perempuan dalam kepengurusan partai politik DPD Golkar kota Bandar Lampung ialah bahwa apabila seorang perempuan yang memiliki aktifitas dan pekerjaan diluar rumah dapat menyeimbangkan pekerjaan dan tidak meninggalkan kewajiban di dalam rumahtangganya, mendapat ridha dan izin dari suami serta tidak mendatangkan hal-hal yang mudharat terhadap diri dan agamanya, maka

Islam sebagai pedoman pun tidak melarangnya. Sehingga dalam Islam hukum bagi perempuan yang bekerja adalah mubah atau diperbolehkan. Bahkan hukumnya menjadi wajib apabila perempuan tersebut tidak memiliki suami lagi dan menjadi tulang punggung keluarganya.

B. Rekomendasi

Dalam rangka meningkatkan peran perempuan pada posisi yang strategis di kepengurusan partai politik DPD Golkar Kota Bandar Lampung, penulis merekomendasikan antara lain :

1. Kepada pengurus perempuan dalam partai politik sebaiknya lebih mengembangkan pengetahuan untuk dapat menjalankan tugas dan kinerja yang baik.
2. Kepada pengurus laki-laki supaya setiap pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan partai harus menjalin kerjasama yang baik dengan pengurus perempuan.
3. Kepada pimpinan partai sebaiknya pengurus perempuan bekerja disesuaikan dengan fitrahnya, karena sebagai ibu rumah tangga di dalam keluarganya, tentu banyak kewajiban-kewajiban baik sebagai seorang istri terhadap suaminya dan ibu dari anak-anaknya yang mesti dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Syuqqah, 'Abd al-Halim. 1997. *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr al-Risalah*. Alih bahasa oleh Chairul Halim dengan judul "Kebebasan Wanita". Jilid 1-6. Jakarta: Gema Insani Press. Cet I.
- Abdul Djalil, Dkk. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*. Yogyakarta: LkiS. 2000.
- Ahmad Shalabi, *Mausu'ah Tarikh al-Islami wa al-Hadharah al-Islamiyah*. Kairo. 1975.
- Al-Qu'an al-karim*.
- Al-Buthi, *Perempuan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam*, (Yogyakarta: Suluh Press. 2003.
- Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan, 2005. *Al-Mar'ah baina Thughyan al-Nizham al-Gharbiy wa Lithaifi al-Tasyri' al-Rabbaniy*. Alih bahasa oleh Abu Nabila dkk. dengan judul "Pandangan dalam Pandangan Hukum Barat dan Islam". Yogyakarta: Suluh Press. Cet. I.
- Al-Tarsyah, Abnan. 2001. *Daliluka ila al-Mar'ah*. Alih bahasa Gazi Saloom dengan judul "Serba Serbi Wanita: Panduan Mengenal Wanita", Jakarta: Penerbit Almahira, Cet. I.
- Azizah al-Hibri,et, al, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Sunan Kali Jaga Press. Yogyakarta, 2001.
- Badri Yatim. 2001. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo PAERSADA. Cet. XII.
- Baharun, Hasan dan Syafiqiyah Adhimiy. 2018. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan Iddah Wafat dalam Perspektif Masalah Mursalah" Jurnal Al-'Adalah Vol XXI No 1, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Crotty , Richard S. Katz dan William, *Handbook Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2006).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih Bahasa Oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Asegaf. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Hasan, Farid Nu'man. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2018.

Husen Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LkiS. 2007.

Jawad, Haifaa A. 2002. *The Right of Women in Islam: An Authentic Approach*. Alih bahasa oleh Anni Hidayatun Noor dkk. Dengan judul: "Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atau Kesetaraan Gender". Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, Cet. I, 2002.

Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994.

Jumu'ah, Ahmad Khalid. *Sirah Shohabiyah Yang Dijamin Masuk Surga*. Jakarta: 2011.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Alumni. 1986.

Lexi. J. Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2005.

M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 1996.

Nasrudin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina. 2001.

Ngainin Naim. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Bandung: Teras. 2009.

Nugroho Dewanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pt. Yrama Widya 2004 Bandung.

Nunung Rodliyah, *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia dan Departement Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Diponegoro, Bandung 2006.

Siti Muri'ah. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Group. 2011.

Siti Maryam dkk. (ed). 2004. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI. Cet. II.

Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan (Upaya Mengakhiri I Depolitisasi Perempuan di Indonesia)*, Kibar Press, Yogyakarta, 2007.

Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.

Syaikh Mutawali As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan*. Jakarta: Amzah. 2009.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi dkk. 2004. *Pedomanan Penelitian Edisi 2004*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Neferi Yogyakarta.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Undang-Undang No 02 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Jakarta.

Ziyadah, Asma' Muhammad Ahmad. 2001. *Daur al-Mar'ah al-Siyasiy fi 'ahd al-Nabiy wa al-Khulafa' al-Rasyidin*, Alih bahasa oleh Kathur Suhardi dengan judul "Peran Politik Wanita dalam Sejarah Islam", Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Cet. I.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Panduan Wawancara
Kepada Pengurus Inti Partai Politik Golkar**

A. Identitas Responden

1. Nama : Yuhadi, S.H
Jabatan : Ketua Umum Partai Politik DPD Golkar
Umur : 47 tahun
Alamat : Gotong Royong

2. Nama : Ali Wardana, SIP.
Jabatan : Sekretaris Umum Partai Politik DPD Golkar
Umur : 38 tahun
Alamat : Way Halim

3. Nama : Sabnu Alie
Jabatan : Ketua Harian Partai Politik DPD Golkar
Umur : 43 tahun
Alamat : Campang Raya

B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana sejarah singkat partai politik golkar?
2. Sejak kapan bapak menjabat sebagai ketua umum/ sekretaris umum/ ketua harian di partai politik golkar?
3. Apa tujuan bapak menjabat di partai politik golkar ini?
4. Bagaiman pendapat bapak terhadap kinerja pengurus perempuan di partai politik golkar ini?
5. Apa saja kendala-kendala yang sering bapak hadapi terhadap pengurus perempuan di partai politik golkar ini?
6. Bagaimana cara bapak mengatasi kendala tersebut?

Panduan Wawancara
Kepada Pengurus Perempuan Partai Politik Golkar

A. Identitas Responden

1. Nama : SUMARNI
Jabatan : Ketua Bidang Perempuan
Umur : 46 Tahun
Alamat : Labuhan Ratu

2. Nama : Hj. Darmawika
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Perempuan
Umur : 48 tahun
Alamat : Way Halim

3. Nama : SRI MUJIYATI
Jabatan : Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
Umur : 39 Tahun
Alamat : Teluk Betung

4. Nama : Hj. Dolly Sandra, SP.
Jabatan : Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif
Umur : 42 Tahun
Alamat : Kemiling

5. Nama : DRA. Hj. TATIK RAHAYU NINGSIH, M.Sos. I
Jabatan : Ketua Bidang Keagamaan
Umur : 42 Tahun
Alamat : Kemiling

B. Daftar Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi ibu dapat menjadi salah satu pengurus di partai politik Golkar ini?
2. Sejak kapan ibu memiliki jabatan di kepengurusan partai ini?

3. Apakah peran yang ibu emban saat ini sudah ibu jalankan dengan sebagaimana mestinya?
4. Apa saja yang menjadi kendala saat ibu menjalankan peranan ibu dalam kepengurusan di partai?
5. Bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut?
6. Pada dasarnya ibu adalah ibu rumah tangga yang seyogyanya harus memenuhi kebutuhan anak dan suami di rumah. Bagaimana cara ibu mengatur waktu yang secara bersamaan dengan karir ibu?



Foto Dokumentasi





Doc.13,15 November 2018



Doc. 16, 17 November 2018



Doc.17 November 2018